

HUKUM ADOPSI KUCING MENGGUNAKAN MAHAR PADA *PETSHOP* DI KOTA PALANGKA RAYA

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh:

Belly Saputra

NIM. 1502130051

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1441 H / 2020 M**

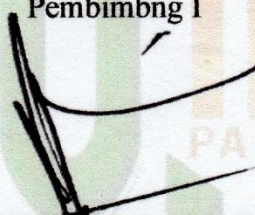
PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : HUKUM ADOPSI KUCINGMENGGUNAKAN
MAHAR PADA *PETSHOP* DI KOTA PALANGKA
RAYA (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)
NAMA : BELLY SAPUTRA
NIM : 1502130051
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

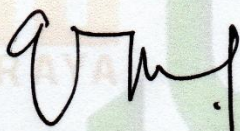
Palangka Raya, 20 Mei 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

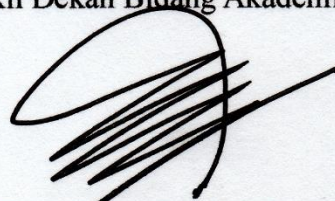

Dr. Syarifuddin, M. Ag.
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II

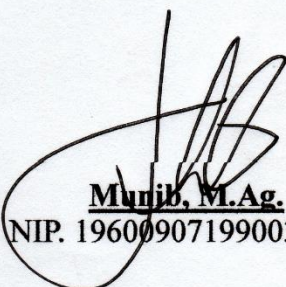

Erry Fitrya Primadhany, S.HI, M.H.
NIP.199004182019032013

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah


Munib, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Belly Saputra

Palangka Raya, 20 Mei 2020

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi IAIN Palangka Raya

Assalammualakum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

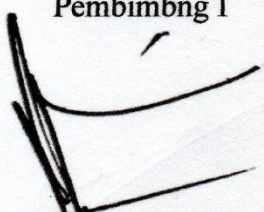
Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **BELLY SAPUTRA**
NIM : **1502130051**
Judul : **HUKUM ADOPSI KUCING MENGGUNAKAN
MAHAR PADA *PETSHOP* DI KOTA PALANGKA
RAYA (TINJAUAN HUKUM EKONMI SYARIAH)**

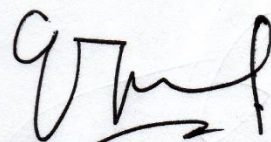
Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbng I


Dr. Syarifuddin, M. Ag.
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II


Erry Fitrya Primadhany, S.HI, M.H.
NIP. 199004182019032013

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **HUKUM ADOPSI KUCING MENGGUNAKAN MAHAR PADA *PETSHOP* DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh **BELLY SAPUTRA, NIM. 1502130051** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juni 2020

Palangka Raya, 15 Juni 2020

Tim Penguji

1. **H. Syaikh, M. HI**
Ketua Sidang/ Amggota
2. **Tri Hidayati, S.HI., M.H.**
Anggota I
3. **Dr. Syarifuddin, M. Ag**
Amggota II
4. **Erry Fitrya Primadhany, S.HI, M.H.**
Sekretaris/ Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya

(.....)

Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

HUKUM ADOPSI KUCING MENGGUNAKAN MAHAR PADA *PETSHOP* DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangka Raya yang mana praktiknya seperti praktik jual beli binatang peliharaan. Sedangkan, fenomena tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim No. 1569, Abu Daud No. 3333, An-Nasa'i No. 466, Ibnu Majah No. 2161 dan Tirmidzi No. 1279 yang menjelaskan tentang larangan memperjualbelikan anjing dan kucing. Praktik ini terkesan menyembunyikan jual beli kucing dibalik kata adopsi kucing menggunakan mahar. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* dan status hukumnya. Penelitian normatif empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data secara induktif, kesimpulan data dan analisis hukum Islam.

Hasil penelitian ini: (1) Adopsi kucing menggunakan mahar yang terjadi pada *Petshop-Petshop* di Kota Palangka Raya merupakan praktik tukar menukar kucing ras seperti ras angora, himalaya, persia, dan lain-lain dengan mahar tertentu yang awalnya ditentukan oleh pelaku usaha *petshop* yang biasanya berupa uang. Latar belakang adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangka Raya adalah praktik adopsi kucing yang berjalan pada *petshop-petshop* di Kota Palangka Raya. Yang mana para pelaku usaha *petshop* menggunakan kata adopsi kucing untuk memperhalus jual beli kucing dan mahar yang dimaksud dalam praktik tersebut adalah upah merawat dan menjaga selama kucing itu di *petshop*. (2) Status hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* adalah boleh selama kucing yang diadopsi tidak untuk dikonsumsi. Ditinjau secara *hilla al-hukmi*, Praktik adopsi kucing menggunakan mahar termasuk dalam *hilla bil al-istihsan*. Secara *istihsan*, hadits yang melarang jual beli anjing dan kucing yang diriwayatkan oleh Muslim no. 1569 hanya berlaku pada kucing liar yang ada dijalanan. Kata *السِّنُّور* menurut jumhur ulama adalah kucing liar yang mana apabila diperjual belikan termasuk perbuatan yang sia-sia (mubazir) karena sifatnya sulit dijinakkan dan takut akan menyakiti majikannya. Maka ada pengecualian kepada kucing peliharaan contohnya kucing ras yang mudah dijinakkan dan tidak bersifat liar. Secara psikologi, memelihara kucing juga dapat membuat majikannya tidak merasa kesepian dan mempunyai teman bermain pada saat sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa senang pada seseorang. Ditinjau secara *qiyas*, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* diqiyaskan dengan jual beli benda najis. Menurut mazhab syafi'i, objek yang diperjual belikan adalah suci dan bermanfaat. Kucing di kategorikan hewan najis untuk dikonsumsi oleh karena itu adopsi kucing dengan tujuan untuk di makan adalah dilarang. Namun, kucing termasuk hewan yang suci badan dan air liurnya sehingga jumhur ulama sepakat bahwa memperjualbelikan kucing boleh. Dan ditinjau secara *maṣlaḥah*, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada

petshop ini memenuhi beberapa syarat *maṣlaḥah* sehingga praktik adopsi ini dari sisi masalah adalah sah.

Kata Kunci: adopsi, mahar, jual beli



THE LAW OF CAT ADOPTION IN USING DOWRY ON PETSHOP AT PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

This research bases on the rampant of using dowry in pet shop at Palangka Raya city, this practice same as pets trade activities. Otherwise this phenomenon contradicts with some hadiths by muslim No. 1569, Abu Dawud No. 3333, An-Nasa'i No. 466, Ibn Majah No. 2161 and Tirmidhi No. 1279 these hadiths tell about the prohibition in trading dog and cat. The practice seems hide the buying and selling activities behind the name of cat adoption using dowry. The focus of this research are on cat adoption practice implementation using dowry on pet shop and its' legal status. This Normative research used descriptive approach with stages of analysis such as: data filtering, inductive data presentation, data conclusions and analysis of Islamic law.

The finding of this research showed some points: (1) Using dowry practice when adopting cats that happen in Palangkaraya city's Pet shop is kind of cat breeds exchange such Anggora, Himalayan, Persian and others using certain dowry was originally determined by the pet shop owner, usually in form of some money. This practice happens in every Palangkaraya pet shop. The pet shop owner uses word "adoption" to ease the process of buying and selling cats and the dowry here as a wage for caring the cats all this time. (2) The legal status of this case is allowed as long as the cats are not for consumed. Base on *hillah al-hukmi* reviewed cat adoption practices are included in *hillah bil al-istihsan*. On *istihsan*, prohibit buying and selling dog and cat narrated by Muslim No.1569 only apply on wild cat. The word *السِّنَوْر* according to the scholars, wild cat which is being traded only bring useless because the nature of it is hard to tame and can hurt the owner. But there is an exception on pet cat such as pure bread cats that easy to tame. Psychologically has a cat as a pet can make the owner do not fell lonely and has playmate in free time. Those things can make someone happy. Base on *qiyas* reviewed, cat adoption practice using dowry is done by pet shop same as unclean trade. According to syafi'i sect the object is pure and helpful so cats are categorized as unclean animal if used for consumption and it is prohibited. However, the scholars agreed that cats are pure animal as result the buying and selling cats practice is allowed. Base on *maṣlaḥah* reviewed, cat adoption practice using dowry in this case meets several *maṣlaḥah* requirements therefore this adoption practice is legal.

Keywords: *adoption, dowry, buying and selling*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar Pada *Petshop* di Kota Palangka Raya ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Kharil Anwar, M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Ibu Laili Wahyunita, M.Cs. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu memberikan motivasi.

5. Bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Erry Fitrya Primadhany, S.HI, M.H. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Tri Hidayati, S.HI., M.H. selaku dosen yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Sadiani, M. H. selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memahami skripsi.
9. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
10. Bapak KH. Zainal Arifin selaku Ketua MUI Kota Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
11. Orangtua saya terutama mama yang selalu memberi dukungan baik materiil maupun moril.
12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan sarang yang bersifat membangun sangat penuls harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah penulis laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bag penulis khususnyamaupun para pembaca. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, 18 Mei 2020

Penulis

Belly Saputra

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Belly Saputra

NIM : 1502130051

Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 05 Juni 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“HUKUM ADOPSI KUCING MENGGUNAKAN MAHAR PADA *PETSHOP* DI KOTA PALANGKA RAYA”** ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Mei 2020



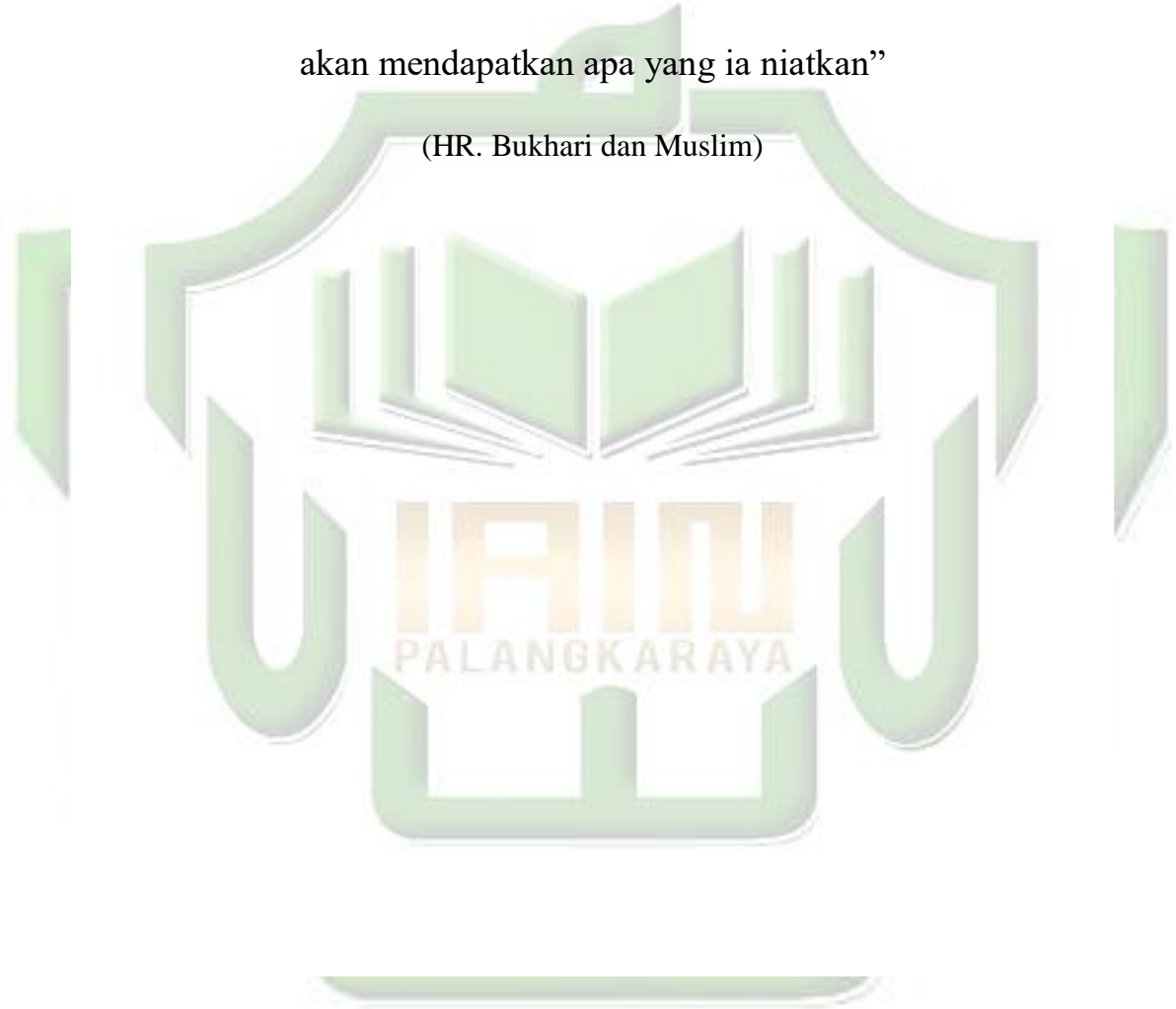
Belly Saputra
NIM. 1502130051

MOTTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”

(HR. Bukhari dan Muslim)



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

الحمد لله رب العالمين

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

ABAH ULUN TERSAYANG YUSRAN

Abah yang selalu memberikan perhatian kepada ulun, mencurahkan keringatnya untuk membesarkan ulun, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjaga ulun selagi ulun anak-anak

MAMA ULUN TERCINTA HJ. SITI FATMAH

Mama yang setiap hari memperhatikan ulun dari kecil hingga besar, sosok yang tangguh dan tanpa menyerah yang menggantikan semua peran abah untuk mendukung pendidikan ulun dari madrasah ibtidayah sampai sekarang. Pian lah harta berharga ulun, I love u mom

KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HES 2015

kawan-kawan seperjuangan HES 2015 yang menjadi kawan terbaik dan luar biasa, senyum dan tawa kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang selama ini dijalani. Terima kasih atas semua pengalamannya dan pelajarannya khususnya tentang persahabatan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je

ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritik	15
1. Teori ' <i>Urf</i>	15
2. Teori <i>Hillah al- hukmi</i>	18
3. Teori <i>Maşlahah</i>	29
4. Teori <i>Qiyas</i>	30
5. Teori <i>Maqaşid asy-Syari'ah</i>	36
C. Kerangka Konseptual.....	37
1. Konsep Jual Beli.....	37
2. Konsep Adopsi Hewan.....	46
3. Konsep Mahar	49
D. Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Waktu dan Tempat Penlitan.....	54
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	55

C. Objek dan Subjek Penelitian	56
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Teknik Keabsahan Data.....	61
G. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	64
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	64
B. Hasil Penelitian	75
C. Analisis	91
1. Latar Belakang Adopsi Kucng Menggunakan Mahar pada <i>Petshop</i> di Kota Palangka Raya	91
2. Tinjauan Hukum Adopsi Kucing Menggunakan Mahar pada <i>Petshop</i> di Kota Palangka Raya	98
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
A. Buku.....	109
B. Internet	114
C. Wawancara.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang aktif bersosialisasi, makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Suatu kumpulan manusia biasa disebut masyarakat, semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak. Salah satu hak yang diterima masyarakat adalah hak untuk bermuamalah. Muamalah adalah salah satu cara pendekatan manusia satu dengan yang lainnya, agar terjalin sosialisasi yang baik.

Didalam buku karangan Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, muamalah memiliki beberapa makna yang pertama, dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata *عامل – يعمل – معاملة*, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.

Dari pengertian muamalah dapat menyadarkan kita bahwa bermuamalah itu sangatlah penting adanya di lingkungan bermasyarakat. Salah satu muamalah yang sering kita jumpai di kehidupan bermasyarakat adalah transaksi jual beli.

Jual beli adalah sebuah transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang bisa antara satu orang dengan satu orang, satu orang dengan orang banyak, bahkan orang banyak dengan orang banyak. Mereka bisa disebut penjual dan pembeli, yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain

atau juga bisa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan cara dan akad tertentu.

Adapun dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan melakukan transaksi jual beli terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...

Di antara macam-macam jual beli benda yang kelihatan wujudnya yang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli binatang peliharaan. Jual beli binatang peliharaan biasa dilakukan di *Petshop*, *Petshop* adalah nama populer dikalangan masyarakat untuk penyebutan tempat penjualan binatang peliharaan. Di antara binatang peliharaan yang masyarakat gandrungi adalah hewan seperti anjing, hamster, kelinci, burung, dan kucing. Akan tetapi, yang lebih ramai dijual antara binatang-binatang peliharaan adalah kucing. Kucing selain wajahnya yang imut serta tingkahnya yang lucu dia juga lebih mudah akrab dengan pemiliknya, itulah salah satu faktor masyarakat banyak memilih kucing untuk menjadi hewan peliharaan mereka dirumah.

Fenomena di atas tampak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim No. 1569, menjelaskan bahwa akan larangan memperjualbelikan binatang peliharaan anjing dan kucing. Adapun hadits tersebut adalah:

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ؟ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

Artinya:

aku bertanya kepada Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam melarang hal tersebut.

Abu Muhammad Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Zajar dalam hadits di atas adalah larangan keras. (Al-Muhalla, 9: 13)

Juga dari Jabir, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ

Artinya

Nabi SAW melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing. (HR. Abu Daud No. 3333, An-Nasai No. 466, Ibnu Majah No. 2161 dan Tirmidzi No. 1279. Syaikh Al-Bani menyatakan bahwa hadits ini shahih).¹

Namun, terdapat *khilafiyah* diantara para ulama mengenai hadits jual beli kucing tersebut. jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah memperbolehkan jual beli kucing dengan alasan telah mencukupi kriteria-kriteria hewan yang boleh untuk diperjualbelikan. Diantara kriteria itu adalah suci dan bermanfaat, dan kucing adalah hewan yang suci dan bermanfaat. Diantara bentuk manfaat tersebut adalah keindahannya yang membuat pemiliknya senang dan terhibur, serta bisa menangkap tikus dan binatang-binatang kecil lainnya. Jumhur ulama juga membantah bahwa kucing yang dimaksud pada hadits tersebut adalah kucing liar yang tidak memiliki manfaat dan kucing yang bukan milik penjual.²

¹ Muhammad Abduh Tuasikal, "Hukum Jual Beli Kucing", dalam <http://rumaysho.com/3549-hukum-jual-beli-kucing.html>. (15 September 2018).

² Novi Yuspita Sari, "Hukum Jual Beli Kucing Peliharaan", dalam <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-jual-beli-kucing-peliharaan/>. (12 Juni 2020).

Oleh karena *khilayah* diantara para ulama tersebut, masyarakat Kota Palangka Raya khususnya yang beragama Islam menjadi ragu-ragu dalam melakukan jual beli kucing dan juga tidak adanya fatwa tentang jual beli kucing dari MUI Kota Palangka Raya sehingga masyarakat tidak adanya pedoman hukum yang membuat yakin dalam melakukan jual beli kucing tersebut.

Untuk menghilangkan keraguan yang dialami oleh masyarakat, maka muncullah istilah adopsi kucing di *petshop-petshop* yang ada di Kota Palangka Raya. Dan juga untuk menghindari adanya harga dalam praktik tersebut masyarakat menggunakan istilah mahar sebagai tanda sepakat adopsinya.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, di Kota Palangka Raya terdapat beberapa toko yang memperjualbelikan binatang peliharaan di antaranya adalah Toko 1 yang terdapat di jalan Rajawali, Toko 2 terdapat di Nyai Undang, Toko 3 Terdapat di jalan Seth Adji, Toko 4 terdapat di jalan Tjilik Riwut, dan Toko 5 terdapat di jalan Sisingamangaraja. Itu adalah beberapa tempat praktik jual beli binatang peliharaan di kota Palangka Raya.³

Observasi awal penulis mengunjungi tempat praktik jual beli binatang peliharaan yang berada di jalan Pilau. Tempat praktik jual beli tersebut adalah *Petshop* KENZIRO dengan sistem adopsi kucing sebagai berikut:

1. Memilih kucing yang akan diadopsi (Kenziro menyediakan 3 ekor kucing yang siap diadopsi).

³ *Observasi tempat-tempat usaha petshop di Kota Palangka Raya* (Palangka Raya, 14 September 2018).

2. Calon pengadopsi dan pemilik merundingkan kesepakatan mahar kucing yang akan diadopsi (untuk penawaran awal pemilik menaruh mahar Rp800.000).
3. Setelah menyepakati mahar kucing yang telah disepakati, calon pengadopsi dipersilahkan untuk membayar mahar.
4. Setelah membayar mahar, pengadopsi diperbolehkan untuk membawa kucing yang telah diadopsi.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas serta hasil observasi awal di kota Palangka Raya, penulis tertarik untuk mengkaji istilah adopsi kucing tersebut dengan memilih judul :

**“HUKUM ADOPSI KUCING MENGGUNAKAN MAHAR PADA
PETSHOP DI KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adopsi kucing dengan mahar menurut pelaku usaha *petshop* di kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik adopsi kucing dengan mahar di kota Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

⁴ Susi Susanti, *Wawancara* (Palangka Raya, 14 September 2018).

1. Untuk mengetahui latar belakang adopsi kucing dengan mahar menurut pelaku usaha *petshop*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik adopsi kucing dengan mahar di kota Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Ekonomi secara umum maupun syariah.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.
 - d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti ataupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian ulang.
2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk pelaku usaha *petshop* sebagai bahan yang semoga berguna untuk memahami bagaimana status hukum akad adopsi dan hukum jual beli tentang kucing.
- b. Untuk Ulama setempat, sebagai salah satu bahan dakwah praktik muamalah yang sesuai dengan syariat atau Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk masyarakat kota Palangka Raya agar menjadikan bahan acuan pemahaman mengenai adopsi kucing yang dilakukan di *Petshop*.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.⁵

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁶

2. Pengertian *Petshop*

Petshop adalah toko hewan yang melayani jual beli barang-barang kebutuhan hewan peliharaan, juga tempat penitipan dan perawatan hewan

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwa, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 174-175.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

peliharaan. Dan ada juga yang menjual hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, hamster dan hewan peliharaan lainnya.

3. Pengertian Adopsi

Secara etimologis, adopsi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *adopt* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.⁷

Di dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa *adoptie* adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁸ Dari definisi tersebut yang ditekankan adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung baik dari segi hak maupun kewajibannya.

Biasanya kata adopsi ini digunakan untuk pengangkatan anak yang terlantar atau anak yatim piatu atau juga pada bayi yang dibuang oleh orangtuanya sendiri. Adopsi ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara seorang anak agar dapat melangsungkan hidupnya secara sejahtera yang mana semua kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab orangtua angkatnya. Namun, seiring berjalannya waktu kata adopsi ini menjadi perluasan makna yang mana masyarakat juga menggunakannya untuk memungut hewan peliharaan seperti kucing.

Jadi, hemat penulis bahwa adopsi berarti adanya pemindahan beban tanggung jawab dari salah seorang kepada orang lain dalam hal menjaga dan memelihara sesuatu secara baik.

⁷ Jhon. M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Vol. 23. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), 13.

⁸ J.C. T. Simonangkir et al., *Kamus Hukum*, Vol. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, meliputi Penelitian Terdahulu, Kerangka teoritik, kerangka konseptual dan kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di kota Palangka Raya , dan status hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di kota Palangka Raya.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema adopsi kucing terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui di antaranya sebagai berikut:

1. Noor Laila M Habibah (2017), dengan judul skripsi *Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing : Studi Ma'anī al-Hadīṣ*. Fokus penelitian ini membahas secara khusus pemahaman hadis mengenai larangan jual beli anjing dan kucing (*studi ma'ani al-hadi*). Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif yaitu kajian kepustakaan dengan Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan tematik (*mauḍu'i*) yaitu menelusuri hadis berdasarkan tema.

Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

”... Berdasarkan hasil penelitian bahwa kualitas hadis ini tergolong Ṣaḥīḥ. Mengenai pemahaman hadis secara tekstual anjing bersifat

tahrīm dan kucing bersifat makruh tanzih menurut mayoritas ulama. Sedangkan kontekstualisasinya pada masa sekarang melihat maraknya perjualbelian anjing dan kucing di pasaran dan media-media online, dinyatakan bahwa tidak keseluruhan anjing dilarang untuk diperjualbelikan. Namun, ada pengecualian untuk anjing yang banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia boleh diperjualbelikan, seperti anjing yang terlatih untuk berburu, menjaga keamanan dan sebagai pelacak. Begitupun dengan kucing yang status kepemilikannya jelas dan bermanfaat, baik sebagai seni keindahan dalam pemandangan sehari-hari ataupun sebagai hiburan, serta untuk mengurangi ketegangan saraf maka jual belinya sah dan hasilnya juga halal. Jadi, Selama proses transaksi jual beli kedua binatang tersebut sesuai dengan etika yang dibenarkan oleh syara' maka diperbolehkan.”⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu muamalah hewan peliharaan seperti kucing. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Noor Laila M Habibah terfokus pada pemahaman hadis mengenai larangan jual beli anjing dan kucing (*studi ma'ani al-hadi*), sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di kota Palangka Raya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Umi Fauziyah (2014), dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoardjo*. Fokus penelitian ini membahas jual beli anak kucing ras yang dilakukan di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoardjo. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode Kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

⁹ Noor Laila M Habibah, “Larangan jual beli anjing dan kucing : studi ma'anī al-ḥadīṡ” (Skripsi- UIN Walisongo Semarang, 2017), xvii.

“Praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading ajar II Sidoardjo berjalan seperti transaksi jual beli pada umumnya yang berlaku di tengah masyarakat serta dalam praktik jual beli ini memperjualbelikan anak kucing ras angora dan persia yang berumur antara dua minggu sampai tiga bulan. Adapaun status hukumnya tergantung dar perlakuan pembeli selanjutnya. Jika pembeli mampu merawat dengan benar, maka akibat hukumnya mubah. Jika pembeli ragu tdak bsa merawat, maka akibat hukumnya makruh. Namun, jika pembeli tidak merawatnya, maka ukumnya haram. Penjual anak kucing ras hendaknya menunggu sampai anak ucing ras tumbuh dewasa.”¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu muamalah hewan peliharaan seperti kucing. Adapun perbedaanya adalah jika penelitian Umi Fauziyah terfokus pada jual beli anak kucing ras angora maupun persia yang dilakukan penjual pasar mingguan Gading Fajar II Sidoardjo, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di kota Palangka Raya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Umi Kholifah (2017), dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di Petshop Purwokerto)*. Fokus penelitian ini membahas jual beli kucing secara umum, artinya apakah jual beli kucing boleh dilakukan, haram atau halalkah hasil uang dari jual beli kucing, dan apakah semua ras kucing boleh diperjualbelikan termasuk kucing liar, kucing hutan, dan kucing yang ada disekitar kita. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode Kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

¹⁰ Umi Fauziyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoardjo” (Skripsi- UIN Sunan Ampel, 2014), abstraksi.

“...Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kucing peliharaan di *Pet Shop* Purwokerto sebagai berikut: Ulama 4 madzhab yaitu Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi’iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan dan pernyataan ini, berdasarkan fakta karena kucing bukanlah hewan yang najis. Dengan catatan bukan termasuk dalam golongan kucing liar (sinnaur). Akibat hukum dari jual beli ini mubah (boleh) karena kucing juga termasuk hewan kesayangan Rasulullah SAW dan termasuk hewan yang bermanfaat apabila menjadi hewan peliharaan di rumah.”¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu muamalah hewan peliharaan seperti kucing. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Umi Kholifah terfokus pada jual beli kucing secara umum, artinya apakah jual beli kucing boleh dilakukan, haram atau halalkah hasil uang dari jual beli kucing, dan apakah semua ras kucing boleh diperjualbelikan termasuk kucing liar, kucing hutan, dan kucing yang ada disekitar kita, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di kota Palangka Raya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, sudah tampak jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki perbedaan.

¹¹ Umi Kholifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucng Peliharaan (studi di Petshop Purwokerto)” (Skripsi- IAIN Purwokerto, 2017), 78.

TABEL 1

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama, tahun, judul, dan jenis penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Noor Laila M Habibah, 2017, dengan judul skripsi <i>Larangan Jual Beli Anjing dan Kucing : Studi Ma'anī al-Hadīs</i> . Adapun jenis penelitiannya adalah kualitatif yaitu kajian kepustakaan dengan Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan tematik (mauḍu'i)	Tema penelitian yaitu muamalah hewan peliharaan seperti kucing	Penelitian Noor Laila M Habibah terfokus pada pemahaman hadis mengenai larangan jual beli anjing dan kucing (<i>studi ma'ani al-hadi</i>), sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap persepsi pelaku usaha <i>petshop</i> di Palangka Raya tentang adopsi kucing
2.	Umi Fauziyah, 2014, dengan judul skripsi <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo</i> . Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan metode Kualitatif	Tema penelitian yaitu muamalah hewan peliharaan seperti kucing	Penelitian Umi Fauziyah terfokus pada jual beli anak kucing ras anggora maupun persia yang dilakukan penjual pasar mingguan Gading Fajar II Sidoarjo, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap persepsi pelaku usaha <i>petshop</i> di Palangka Raya tentang adopsi kucing
3.	Umi Kholifah (2017), dengan judul skripsi <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi di Petshop Purwokerto)</i> . Adapun jenis	Tema penelitian yaitu muamalah hewan peliharaan seperti kucing	Penelitian Umi Kholifah terfokus pada jual beli kucing secara umum, artinya apakah jual beli kucing boleh dilakukan, haram atau

	penelitiannya adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan metode Kualitatif	halalkah hasil uang dari jual beli kucing, dan apakah semua ras kucing boleh diperjualbelikan termasuk kucing liar, kucing hutan, dan kucing yang ada disekitar kita, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap persepsi pelaku usaha <i>petshop</i> di Palangka Raya tentang adopsi kucing
--	--	--

B. Kerangka Teoritik

1. Teori 'Urf

Dalam sebuah masyarakat bisa jadi terdapat akad yang menjadi tradisi. Namun demikian, dalam hukum Islam tidak semua tradisi dapat diterima. Dalam hukum Islam tradisi disebut pula dengan istilah '*urf*'. Kata '*urf*' sendiri berasal dari kata '*arafa*' ya '*rifu*' sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.¹² Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹³ Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu '*urf*' dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan,

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Vol. 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 387.

¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 153.

tidur. Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁴ Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.¹⁵ *Urf* ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan dia mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.¹⁶

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *ushul fiqh* mendefinisikan *urf* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.¹⁷ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *ushul fiqh* kaidah-kaidah penetapan hukum islam dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi bahwasannya “*urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *urf* disebut juga adat kebiasaan”.¹⁸

Kemudian Rahman Dahlan mendefinisikan:

“*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”¹⁹

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa tidak semua *urf* dapat diterima oleh hukum Islam, oleh karena itu dari segi penilaian baik

¹⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

¹⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 262.

¹⁸ Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

¹⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Vol. 2 (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

dan buruknya ‘urf itu terbagi atas: ‘urf *ṣāḥih* dan ‘urf *fāsid*.²⁰ ‘Urf *ṣāḥih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara*’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘urf *fāsid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara*’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²¹

Kaidah Fiqhiyyah menyebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²²

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara*’ dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash syara*’, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.²³

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴ Apabila dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum

²⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 392.

²¹ Muchlis Usman, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 94.

²² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 140.

²³ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

²⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya al-‘adah secara bahasa diambil dari kata al-‘aud atau al-mu’awadah yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2007), 79-80.

tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-‘ādah Muhakkamah*.

Teori ‘urf digunakan penulis untuk mengetahui apakah praktik adopsi kucing dengan mahar yang sering dilakukan masyarakat di Kota Palangka Raya ini termasuk ‘urf *shahih* atau termasuk ‘urf *fasid*. Hal untuk menentukan praktik tersebut termasuk ‘urf *shahih* atau ‘urf *fasid* dapat penulis cocokkan dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh syara’.

2. Teori *Hillah al- hukmi*

Hillah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/ tanggung jawab.²⁵ Menurut al-Shatibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *shara’* lainnya, dipandang sebagai *hillah*. Sekalipun *hillah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindari diri dari kewajiban *shara’* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan. Sedangkan al-Khadduri mengartikan *hillah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak legal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan

²⁵ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 553-554.

substantif pada keadilan prosedural. *Hillah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.²⁶

Terjadinya perubahan atau penyimpangan dari norma secara praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat mendesak. Perubahan situasi dan kondisi, konsekuensi terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum, yang sesuai dengan teori dan prakteknya.

Dalam kajian keislaman, *hillah* dipakai dalam beberapa hal, yaitu:

- a. *Hillah* atau *al-hiyal* yang dikaitkan dengan konsep politik. *Hillah* diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer dimedan perang. Hal ini didasarkan atas argumen hadis Nabi yang menyatakan *al-harbu khada'ah* (peperangan merupakan ajang adu tipu muslihat), karya yang mengungkapkan ini, dalam konteks politik adalah kitab *al-hiyal* oleh al-Hartami al-Sha'rani, yang dipersembahkan kepada khalifah al-Makmun (813-833).
- b. *Hillah* yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. *Hillah* diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam, menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karya yang menggunakan ini adalah kitab *ma'rifat al-hiyal al-handasiyah* oleh al-Razzaz al-Jazari, kitab *al-hiyal* oleh ibn Musa ibn Syakir dan kitab *al-hiyal al-ruhaniyah* oleh al-Farabi.

²⁶ Madjid al-Khudduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 225.

- c. *Hillah* yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan ini adalah kitab *al-mukhtar fi kasyf al-asrar* oleh al-Jaubary. Abu Yusuf juga disebut-sebut sebaga ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
- d. *Hillah* yang dikaitkan dengan bdang kajian Islam. Hal ini didefinisikan sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam kontek ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum *shara'*.²⁷

Hillah dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, *hillah* ini sering dijadikan alasan untuk menghindari dari pembebanan hukum, karena *hillah* muncul sebagai reaksi dari niai-nilai kemashlahatan yang oleh masyarakat, dipandang urgen, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat *daruri*. Dalam kontek ini, *hillah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan hukum yang legtimatif. Apabila *hillah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila *hillah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyipangan, hanya terletak pada tuntutan keterpaksaan (*daruri*).

Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, istilah *hillah* telah muncul sejak permulaan Islam bahkan *hillah* ini dipakai dalam Qs. an-Nisa (4): 98.

²⁷ Joseph Scahtch, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.al., *The Encyclopedia of Islam*, ed. Vol. III, (Leiden: E.J. Brill, 1971), 510-511.

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Artinya:

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).

Ayat ini turun dalam kontek memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu, untuk tidak ikut hadir di medan perang yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam siasat kemiliteran. Di antara aliran hukum Islam yang paling cenderung terhadap *hillah* adalah mazhab Hanafi yang mempunyai basis di Kufah (Irak).

Hillah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Namun demikian, Imam Abu Hanafi tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep *hillah*. Beliau mengatakan bahwa *hillah* yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain, itu dilarang. Bahkan menganjurkan tidak menggunakan *hillah* yang mengandung perbuatan makhruh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *apabila hillah bermaksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak, maka tidak dilarang*.²⁸

²⁸ Abu Ishaq al-Satibi, *al-Muwafaqat fi Usul al- Shari'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Ma'riah, 1999), 202.

Hillah dalam pandangan Hanafiyah dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Hillah* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk dialihkan pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif penerapannya.

وَحُذِّ بِيدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ ۖ وَلَا تَحْنُتْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعَمَ

الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya:

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).²⁹

Apa yang dilakukan Nabi Ayyub itu, bertujuan untuk melepaskan beban hukum yang berat, yang akan ditanggung/diderita oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya pada waktu Nabi Ayyub menderita sakit. Sedangkan mengenai nikah *tahlil*. Bagi para pendukung *hillah* menganggap bahwa nikah tersebut, merupakan jalan keluar dan upaya dalam menghadapi tuntutan hubungan batin.

²⁹ Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan beliau memohon pertolongan kepada Allah SWT. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar diamenghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mentaati perintah tersebut, maka keluarlah air dari bekas kakinya, atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah beliau dari penyakitnya dan beliau dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak, sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya, pada suatu ketika Nabi Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa beliau akan memukul istrinya., bilamana sakitnya sembuh, karena istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu beliau masih sakit. Akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga beliau tidak dapat memenuhi sumpahnya. Oleh karena itu, turunlah perintah Allah SWT seperti yang tercantum dalam Qs. As-Sad (38): 44 diatas, agar beliau dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

- b. *Ḥillah* dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung disuatu tempat atau fenomena umum, yang belum ada ketentuannya dalam *nas* hukum seperti jual beli bersyarat atau jual beli alternatif.
- c. *Ḥillah* merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan orang lain, untuk mendapatkan hak secara terselubung (*ḥillah*) karena alasan –alasan tertentu, seperti transaksi hibah secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung, yang menyebabkan gugurnya hak *shuf'ah*.

Konsep *ḥillah* Mazhab Hanafi ini, ditentang oleh Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. Termasuk juga Taqiyuddin ibn Taimiyah (w.728). *Ḥillah* dalam untuk menghancurkan bangunan hukum syaria'at. Dalam *ḥillah*, terkandung prinsip ajaran Islam yaitu kemudahan. Disamping bahwa *ḥillah*, tidak boleh menggugurkan kewajiban *syara'* lainnya.³⁰

Paradigma berpikir Mazhab Hanafi ini, didasarkan pada dalil naql, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Sad (38): 44 yang berbunyi:

وَحُذِّ بِيدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ ۚ وَلَا تَحْنُتْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نَعْمَ

الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya:

³⁰ al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*,. 202.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).³¹

Ayat ini menceritakan tentang Nabi Ayyub yang bersumpah akan memukul istrinya (karena istrinya lalai terhadap kewajibannya) sebanyak seratus kali, setelah beliau sembuh dari sakitnya. Namun ketika sembuh, beliau tidak tega memukul istrinya, sebagaimana beliau telah bersumpah pada saat sakit. Dalam hukum syariat, sumpah harus dilaksanakan, akan tetapi Allah SWT. memberi keringanan kepada Nabi Ayyub dengan mengganti pukulan seratus kali dengan pukulan yang menggunakan seikat rumput, sehingga Nabi Ayyub sudah terbebas dari sumpahnya. Upaya mengalihkan pelaksanaan hukum (memukul seratus kali) kepada pelaksanaan hukum yang lebih ringan (memukul dengan seikat rumput) merupakan tindakan *hillah*.

Berdasarkan dalil diatas, dalam penerapan untuk semua kasus yang sama *illat* hukumnya, Mazhab Hanafi menempuhnya dengan menggunakan metode *qiyas*. Dengan dalil ini pula, mereka menamakan teorinya dengan *al-makharij min al-maza'iq* (jalan keluar berbagai kesulitan). Mereka tidak

³¹Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan beliau memohon pertolongan kepada Allah SWT. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar diamenghentakannya kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mentaati perintah tersebut, maka keluarlah air dari bekas kakinya, atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah beliau dari penyakitnya dan beliau dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak, sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya, pada suatu ketika Nabi Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa beliau akan memukul istrinya., bilamana sakitnya sembuh, karena istrinya pernah lalai mengurusnya sewaktu beliau masih sakit. Akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga beliau tidak dapat memenuhi sumpahnya. Oleh karena itu, turunlah perintah Allah SWT seperti yang tercantum dalam Qs. As-Sad (38): 44 diatas, agar beliau dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

menyebut teorinya dengan *hillah* karena *hillah* mempunyai konotasi makna yang negatif.

Kata *makhraja* dipahami oleh mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dengan mengartikan *hillah* sebagai berikut :

- a. *Hillah* sebagai tindakan sadar untuk menerapkan hukum yang lebih ringan daripada hukum yang lebih berat, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (bukan menggugurkan hukum).
- b. *Hillah* dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari jalan keluar atas problematika masyarakat. Oleh karena itu, ketika ulama Hanafiyah menulis sebuah karya yang berkaitan dengan *hillah*, mereka memberikan judul atas karyanya tersebut dengan judul *al-makharij fi al-hiyal* karya Imam Muhammad bin al-Hasan (salah seorang tokoh aliran di Irak yang wafat tahun 189 H/ 804 M), kemudian *al-hiyal wa al-makharij* karya Ahmad ibn Amr Abu Bakar bin Muhair, *al-kashshaf al-Shaibani* kitab ini ditulis bersumber dari Imam Abu Hanifah.³²

Adapun pelarangan *hillah* menurut pandangan al-Syatibi, didasarkan atas pertimbangan :

- a. Tujuan pelaku *hillah* bertentangan dengan tujuan syariat.
- b. Akibat perbuatan *hillah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh syariat.
- c. *Hillah* merupakan pembatalan terhadap hukum.

³²Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahb al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arab, t. th.), 506-507.

- d. Alasan mengharamkan melakukan *hillah* ini, melalui teori *istiqla'* (induksi dari berbagai dalil) misalnya surat al-Baqarah ayat 7, 20 dan 64, juga surat an-Nisa ayat 12. Ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang bersikap riya. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tapi demi keamanan harta dan jiwa mereka, demikian juga orang yang riya dalam beramal.
- e. Larangan *hillah* ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah diantaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai dan orang-orang Yahudi, melakukan *hillah* dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya (HR. Bukhari dan Muslim), orang Yahudi menganggap bahwa yang dilarng adalah memanaatkan lemak bangkai seutuhnya. Oleh karena itu mereka merekayasa untuk dijadikan alat menambal perahu atau penerangan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa lemak bangkai dengan rekayasa dalam bentuk apapun, tetap diharamkan, termasuk juga memakan hasil penjualannya. Dalam keterangan, juga dijelaskan yang berkaitan dengan nikah *tahlil*, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Hambali, Tirmizi, al-Nasa'i dan Abdullah ibn Mas'ud. Disamping itu juga, larangan suap sebagaimana penjelasan hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dari Abdullah ibn Umar.³³

³³ al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi*, 387-388.

Hillah sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum, tidak berdiri sendiri. *Hillah* diterapkan bersama dengan penerapan metode ijtihad lain seperti *darurah*, *maslahah* dan *istihsan*. Sehingga penerapan *hillah* dengan prinsip *darurah* disebut *hillah bi al-darurah*, penerapan *hillah* dengan prinsip *maslahah* disebut *hillah bi al-maslahah*, penerapan *hillah* dengan prinsip *istihsan* disebut *hillah bi al-istihsan*.

Hillah bi al-darurah dalam konteks ini, adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lebih khusus, misalnya *bay al-wafa* yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat di bidang ekonomi (karena orang yang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan), dengan cara *bay al-wafa*, kedua belah pihak dapat melangsungkan transaksi walaupun harus melanggar ketentuan tentang larangan riba. Dalam hal ini, yang dilihat adalah mempertimbangkan resiko mengambil jalan riba yang lebih ringan untuk menghindari riba yang lebih kuat (memilih resiko yang lebih ringan, dijadikan prioritas dalam menghadapi resiko yang dilematis).

Hillah bi al-maslahah dalam konteks ini, adalah dengan melestarikan lima hal yang bersifat *daruri* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya nikah *tahlil* yang bertujuan mengharmoniskan kembali mantan suami-istri dan menjaga keturunan.³⁴

³⁴ Ibid.

Hillah bi al-istihsan dalam kontek ini, adalah meninggalkan hukum yang berdasarkan *qiyas* (kalau penerapan hukum dengan *qiyas*, membawa kepada kesempitan) dengan menerapkan hukum *darurat* atau *masalahah* untuk menghindari kesempitan. Misalnya jual beli dengan kredit, praktek jual beli tersebut menurut sebagian ulama diharamkan karena mengandung riba dan merusak harga (ada dua harga dalam satu transaksi), akan tetapi berdasarkan *istihsan*, dalam jual beli secara kredit sebenarnya konsumen diberi kebebasan memilih diantara dua harga (secara tunai atau secara kredit), sehingga tetap dianggap satu harga. Dan jual beli kredit ini, sangat membantu meringankan konsumen dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Disamping itu pula antara penjual dan pembeli (yang mengambil kredit), terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan (ikrar/perjanjian) sehingga dianggap masih tetap dalam koridor '*an taradin* (sama-sama rela) dan tidak ada unsur pemerasan.³⁵

Hillah diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori *daruriyat* (melestarikan lima unsur pokok), bersifat *qat'i* (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat *kulli* (kemaslahatan tersebut belaku umum).

Teori *hillah* digunakan penulis untuk menganalisis apakah praktik jual beli kucing sama dengan praktik adopsi kucing dengan mahar yang sering dilakukan masyarakat di Kota Palangka Raya. Apabila dari makna kata jual

³⁵ Ibid., h. 388

beli dan kata adopsi sangat berbeda, sedangkan dari praktik muamalahnya perlu adanya penelitian.

3. Teori *Maṣlaḥah*

Menurut Imam Al-Ghazali pada prinsipnya *al-maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).³⁶ Menurut at-Tufi, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menentukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *nas* atau *ijma* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatan sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *nas* atau *ijma* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.³⁷ Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali yang menganggap bahwa suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *nas* maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai *maṣlaḥah mulgah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *nas* terlebih dahulu.

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya

³⁶ Muhammad Yusuf, "Pendekatan al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama", *Ahkam*, Vol. 18, No. 1 (Januari 2013), 100.

³⁷ Imron Rosyadi, "Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan", *SUHUF*, Vol. 25, No. 1 (Mei 2013), 47.

menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.³⁸ Lebih lanjut Asy-Syathibi, seorang ulama ushul fikih, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.³⁹ Oleh karena itu dalam mengkaji adopsi kucing terlebih terhadap praktiknya harus dilihat dengan cermat *nash* yang mengaturnya pada satu sisi dan kemaslahatan manusia pada sisi lain.

Teori *mashlahah* digunakan penulis untuk mengetahui apakah praktik adopsi kucing dengan mahar yang sering dilakukan masyarakat Kota Palangka Raya memberikan kemashlahatan. Kemashlatan yang dimaksud baik untuk pelaku usaha *petshop*, pengadopsi kucing dan kucing itu sendiri.

4. Teori *Qiyas*

Menurut bahasa, *qiyas* berarti mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Para ahli Ushul Fiqih merumuskan *qiyas* dengan: “menyamakan atau mengukur sesuatu kejadian yang tidak ada nash (Al-Qur’an dan Hadist) tentang hukumnya dengan kejadian yang disebutkan dalam nash karena ada kesamaan antara dua kejadian itu didalam ‘*illat* hukum tersebut.” Dari rumusan diatas dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu :

a. Kejadian (واقعة) adalah peristiwa, perbuatan, tindakan yang tidak ada

hukumnya atau belum jelas hukumnya baik dalam Al-Qur’an maupu As-

Sunnah. Dalam ilmu Ushul Fiqih hal ini disebut *far’un* (فرع).

³⁸ Ibid., h. 57.

³⁹ Yusuf, “Pendekatan al-Maslahah, 101.

- b. Suatu peristiwa dapat disebut *far'un* apabila : adanya kemudian dan tidak ada kesamaan '*illat* dengan peristiwa yang akan disainnya. Kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya baik didalam A-Qur'an maupun As-Sunnah disebut *ashal* (اصل) atau disebut juga *maqiis 'alaih* (مقيس عليه) yaitu sesuatu yang akan diqiyaskan kepadanya, atau *masyabbah bih* (مشبه به) yaitu yang akan diserupakan dengannya.⁴⁰

Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan '*illat hukum*. Karena dengan qiyas ini berarti para *mujtahid* telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya al-quran dan hadits. Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam al-quran dan hadits, tapi kadang juga bersifat *implicit-analogik* (tersirat) yang terkandung dalam nash. Beliau Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Namun jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka haruslah dicari dengan cara *ijtihad*. Dan *ijtihad* itu adalah *qiyas*.⁴¹

Proses pengqiyasan dilakukan dengan cara menganalogikan sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan '*illat* akan melahirkan hukum yang sama. Asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), 336.

berdasarkan persamaan sebab dan sifatnya. Apabila pendekatan tersebut menemukan titik persamaan maka konsekuensi hukumnya harus sama pula dengan hukum yang ditetapkan.⁴²

Berbicara mengenai kehujjahan *qiyas* tidak diragukan lagi bahwa aliran jumhur ulama adalah aliran yang tepat dan paling kuat karena argumentasinya berdasarkan atas prinsip berpikir logis disamping tetap berpegang pada Al-Aqur'an dan petunjuk Rasulullah. Firman Allah SWT. QS. An-Nisa ayat 59 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Qur 'an) dan rasul (sunnah) jika kamu benar-bear beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Ayat tersebut menjadi dasar hukum *qiyas*. Karena didalamnya terdapat ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasulnya” tidak lain dan tidak bukan adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda bahwa apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan dengan jalan mencari *'illat hukum* yang dinamakan *qiyas*.⁴³

Adapun hadits Nabi yang artinya:

Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika hendak mengutus Muadz menuju negeri Yaman, berkata kepadanya : Bagaimanakah kau memberi putusan? Muadz menjawab : “Saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Jika saya tidak menemukannya, saya

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., h. 337.

memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah Saw, kemudian jika saya tidak menemukannya, maka saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembrono. Lantas Rasulullah Saw menepuk-nepuk dadanya dan berkata : “Segala puji adalah bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah kepada apa yang diridhoi oleh Rasulullah Saw. (HR. Al-Baihaqi No. 3250)

Dari hadist di atas Rasulullah Saw mengakui Muadz untuk berijtihad, bila dia tidak menemukan nash yang dia gunakan untuk memberi putusan baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Sedang ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk sampai kepada hukum. Dan Ijtihad juga meliputi *qiyas*.⁴⁴

Berdasarkan definisi bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena 'illat serupa. Maka rukun qiyas ada empat macam, yaitu:

- a. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan, sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu nash syara' yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu nash yang menjadi dasar hukum. *Ashl* disebut *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan), *mahmul 'alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
- b. *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh nash.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Dina Setia, t. th.), 71.

- d. *'illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakan dengan hukum *ashl*.⁴⁵

Adapun macam-macam qiyas adalah:

- a. *Qiyas aula*, yaitu suatu *qiyas* yang *'illat*nya itulah yang mewajibkan hukum atau dengan kata lain sesuatu *qiyas* hukum yang diberikan kepada pokok lebih patut diberikan kepada cabang. Contoh *qiyas* tidak boleh memukul orang tua, kepada tidak bolehnya kita mengucapkan perkataan yang menyakitkan hatinya, kepada orang tua. Hukum “tidak boleh” ini lebih patut diberikan kepada memukul daripada dihukumkan kepada mengucapkan perkataan yang menyakitkan hatinya.
- b. *Qiyas musawi*, yaitu suatu *qiyas* yang *'illat*nya mewajibkan hukum. Atau mengqiyaskan sesuatu kepada sesuatu yang bersamaan kedua-duanya yang patut menerima hukum tersebut. Contohnya menjual harta anak yatim diqiyaskan memakan harta anak yatim.
- c. *Qiyas adna* atau *qiyas adwan*, yaitu mengqiyaskan sesuatu yang kurang patut menerima hukum yang diberikan kepada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contoh mengqiyaskan apel pada gandum dalam hal berlakunya riba fadhal karena keduanya mengandung *'illat* yang sama yaitu sama-sama jenis makanan.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 87-88.

- d. *Qiyas al-'aksi*, yaitu tidak adanya hukum *'illat* atau menetapkan lawan hukum sesuatu bagi yang sepertinya karena keduanya itu berlawanan tentang hal *'illat*.
- e. *Qiyas assabri wa taqsim*, yaitu *qiyas* yang ditetapkan *'illatnya* sesudah dilakukan penelitian dan peninjauan yang lebih dalam.
- f. *Qiyas dalalah*, yaitu *qiyas* yang *'illatnya* tidak disebut tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya *'illat* untuk menetapkan sesuatu hukum dari sesuatu peristiwa.
- g. *Qiyas fi ma'nal ashli*, yaitu *qiyas* yang tidak dijelaskan *washaf* (sebab *'illat*) yang mengumpulkan antara pokok dan cabang didalam mengqiyaskan itu.
- h. *Qiyas al-ikhalati wal munasabati*, yaitu *qiyas* yang jalan menetapkan *'illat* yang dipetik dari padanya (yang dikeluarkan dengan jalan *ijtihad*), ialah *munasabah* yakni kemaslahatan memelihara maksud (tujuan).
- i. *Qiyas 'illat*, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain karena kesamaan *'illat* antara keduanya. Contohnya membandingkan hukum minuman yang memabukkan kepada khamar.

Teori *qiyas* digunakan penulis untuk mencari persamaan atau perbedaan *'illat* dari praktik adopsi kucing dengan mahar dan jual beli kucing. Dengan mengetahui persamaan atau perbedaan *'illat* dari kedua bentuk muamalah tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan dari hukum praktik adopsi kucing dengan mahar yang sering dilakukan masyarakat Kota Palangka Raya.

5. Teori *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Semua hal di atas dalam hukum Islam sebenarnya untuk terealisasinya kehendak Allah SWT yaitu terciptanya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, hal ini sebagaimana konsep *maqāṣid asy-syari'ah*, Allah SWT menghendaki dengan hukum-hukumnya manusia hidup dengan maslahat. *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan syari'at) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *maqāṣid asy-syari'ah* yang notabene sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak masalah. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁴⁶ Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafāsīd*).⁴⁷

Syatibi mengungkapkan, yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan

⁴⁶ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern", *Ejournal* (Kopertais, t.th.), 147.

⁴⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2014), 56.

(*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-‘aql*).⁴⁸ Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang memberi kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak.⁴⁹ Oleh karena itu dalam mengkaji hukum adopsi kucing menggunakan mahar perlulah dikaji melalui *maqāṣid asy-syari‘ah* terutama dalam perlindungan atau pemeliharaan harta, hal ini tidak lain untuk mencegah perbuatan yang menodai harta tersebut dengan cara berbuat zalim kepada orang lain yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi orang lain.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan akad umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan atau minuman misalnya, terkadang ia tidak mau memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁵⁰

Secara bahasa, jual beli (*al-bai’*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*). Lafazh *al-bai’* dan *al-syira* memiliki kesamaan makna dan

⁴⁸ Ibid., 56-57.

⁴⁹ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Pemikiran Asy-Syatibi, 148.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain secara suka rela tanpa paksaan atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.⁵¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dan 1458 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya.⁵²

b. Dasar hukum jual beli

Setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.⁵³ Khusus pada jual beli dalil nya sebagai berikut:

Allah SWT Berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.....

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah: 198).⁵⁴

⁵¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2004), 750.

⁵² Tim Permata Press, *Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Yogyakarta: PERMATA PRESS, 2010), 342.

⁵³ A. Zazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 130.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT AdhiAkarsa Abadi Indonesia, 2011).

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (QS. Al-Baqarah: 275).⁵⁵

Selain dari firman Allah SWT ada sebuah kaidah hukum yaitu:

الْأَصْلُ فِي مَعْمَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁶

c. Rukun dan syarat jual beli

1) Rukun jual beli tersiri atas 3 macam:⁵⁷

a) Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَغْتَرِقُ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan. (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ A. Zazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, 130.

⁵⁷ H. Ibnu mas'ud dan H. Zainal Abidin S., *Fiqih madzhab syafi'i*, Vol. 2 (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2007), 26.

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

Diantara syarat sah ijab kabul antara lain:

- (1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
 - (2) Tidak diselingi dengan kata-kata lain.
 - (3) Tidak di ta'likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”, dan lain-lainnya.
 - (4) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain.
 - (5) Orang yang berakad. Antara lain penjual dan pembeli.
 - (6) *Ma' kud alaihi* (uang dan barang).
- b) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Bagi orang yang berakad diperlukan 2 syarat :⁵⁸

- (1) *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli

⁵⁸ Ibid., h. 28.

ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT berirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاُتْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Q.S.An-Nisa:5).⁵⁹

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab kabul).

(2) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka. Firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100.

Artinya:

Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nisa: 141).⁶⁰

c) Barang yang diperjualbelikan (*Ma'kud alaihi*)

Syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:⁶¹

- (1) Suci dan atau mensucikan. Tidaklah sah menjual benda yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.

Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, keji*h), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

- (2) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk

⁶⁰ Ibid., h. 132.

⁶¹ Abidin S., *Fiqih madzhab syafi'I*, 29.

meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

(3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

(4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

(5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2) Syarat-syarat jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :⁶²

a) Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

(1) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)

(2) Keduanya tidak mubazir

(3) Balig

⁶² Chairuman Pasaribu suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “balig}” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

b) Tentang obyeknya

Yang dimaksud obyeknya disini adalah benda yang diperjualbelikan. Benda atau barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁶³

(1) Bersih barangnya. Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan

(2) Dapat dimanfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah- buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi

⁶³ Ibid., h. 37.

dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

(3)Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

(4)Mampu menyerahkan. Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

(5)Mengetahui. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

d. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- 1) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan

- teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
 - 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
 - 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁶⁴

2. Konsep Adopsi Hewan

a. Pengertian adopsi hewan

Biasanya adopsi diartikan pengangkatan anak yang dalam bahasa arabnya disebut *tabanni*.⁶⁵ Yang pada dasarnya bertujuan untuk peduli kepada sesama terlebih terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim.⁶⁶ Begitu juga dengan adopsi hewan, adopsi hewan adalah suatu perbuatan memungut hewan terlantar untuk dipelihara dan dirawat sehingga terhindar dari bahaya yang mengancam hidupnya.

Orang yang mengadopsi hewan disebut juga pengadopsi. Seorang pengadopsi memiliki kewajiban untuk memberi makanan dan obatan, memelihara, serta menyediakan tempat tinggal kepada hewan yang di adopsinya. Agar hewan yang diadopsi mendapatkan kehidupan yang layak.

b. Tujuan adopsi hewan

Terdapat 2 istilah dalam adopsi hewan, yaitu organisasi penyelamat hewan (*shelter*) dan peternak (*breeder*). Mereka memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan adopsi hewan. Organisasi penyelamat hewan (*shelter*) melakukan adopsi hewan untuk menolong hewan tersebut

⁶⁴ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), 98.

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, t. th.), 73.

⁶⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafka, 2002), 21.

terhindar dari keterlantaran, sedangkan, peternak (*breeder*) melakukan adopsi hewan untuk dijual lagi kepada orang lain agar mendapat keuntungan.⁶⁷

c. Dasar hukum adopsi hewan

Adopsi hewan peliharaan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Sehingga, apabila terjadi praktik adopsi hewan diantara kedua pecinta hewan. Maka, mereka biasanya membuat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

d. Manfaat adopsi hewan

Kata adopsi yang digunakan peternak (*breeder*) berarti adalah proses jual-beli satwa. Kata "adopsi" yang digunakan peternak (*breeder*) bertujuan untuk memperhalus kata jual-beli satwa untuk mengambil untung dari proses adopsi tersebut. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh organisasi penyelamat hewan (*shelter*), mereka tidak mengambil untung secara finansial dari proses adopsi. Memang ada beberapa organisasi penyelamat hewan (*shelter*) yang meminta sejumlah uang dalam proses adopsi. Itu lebih karena alasan pendanaan semata, uang yang terlibat dalam proses adopsi dari organisasi penyelamat hewan (*shelter*) bukan dalam rangka mencari untung secara finansial, uang itu akan digunakan kembali mendanai kegiatan organisasi penyelamat hewan (*shelter*). Uang yang diminta oleh organisasi penyelamat satwa umumnya sebagai biaya pengganti sterilisasi/kastrasi dan biaya vaksin.

⁶⁷ Meongers, "Adpsi Kucing", dalam <http://www.meongers.com/memelihara/adopsi-kucing> (17 Januari 2019).

Jadi dengan mengadopsi dan membayar biaya tersebut, membantu 2 satwa terlantar/teraniaya. 1 satwa mendapat rumah dan 1 satwa lagi mendapat bantuan perawatan.⁶⁸

organisasi penyelamat hewan (*shelter*) adalah kumpulan orang-orang yang mendanai kegiatan mereka secara swadaya, jadi perlu dimaklumi jika mereka memiliki keterbatasan. Dengan mengadopsi lewat mereka, Banyak hal positif yang akan didapatkan. diantaranya mendapat satwa yang sudah sehat, karena organisasi penyelamat hewan (*shelter*) sudah merawat satwa yang siap adopsi disamping kesehatan satwa juga sudah terjamin.

Beberapa manfaat mengadopsi hewan dari organisasi penyelamat hewan (*shelter*) dibandingkan membeli pada peternak (*breeder*):

- 1) Membantu satwa teraniaya/terlantar dengan memberikan rumah & kasih sayang sepanjang usianya.
- 2) Membantu pemerintah menjaga lingkungan karena dengan berkurangnya satwa terlantar, lingkungan sekitar semakin sehat.
- 3) Mengurangi populasi satwa terlantar sehingga mencegah satwa terlantar menjadi korban kekerasan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani.
- 4) Memberikan edukasi pada anak-anak kita sebagai generasi penerus ramah satwa yang memiliki hati nurani dan menghargai nyawa makhluk hidup sesama ciptaan Tuhan.⁶⁹

⁶⁸ Ibid.

3. Konsep Mahar

a. Pengertian mahar

Mahar dalam penelitian ini merupakan istilah yang digunakan oleh pelaku usaha *petshop* dalam praktik adopsi kucing. Pada dasarnya mahar diartikan mas kawin yang ada dalam pernikahan. Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya isim *mashdar* dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.⁷⁰ Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁷¹ Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 4 :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah)

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009), 174-175.

⁷¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 105.

pemberian itu (sebagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya.
(Q.S.An-Nis : 4)

Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.⁷²

Mahar juga kadang-kadang diartikan sebagai pengganti kata biaya atas kompensasi terhadap proses pengajaran ilmu, pembelian binatang peliharaan, dan pembelian serangga untuk umpan pancing.

b. Syarat-syarat mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

⁷² V&CoJewellery, "Bagaimana Mahar Pernikahan dalam Islam?", dalam <https://vncojewellery.com/artikel/mahar-pernikahan-dalam-islam-2019-10-12/> (13 Juni 2020).

Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁷³

c. Kadar (jumlah) mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.⁷⁴ Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang bersangkutan untuk menetapkan jumlahnya.

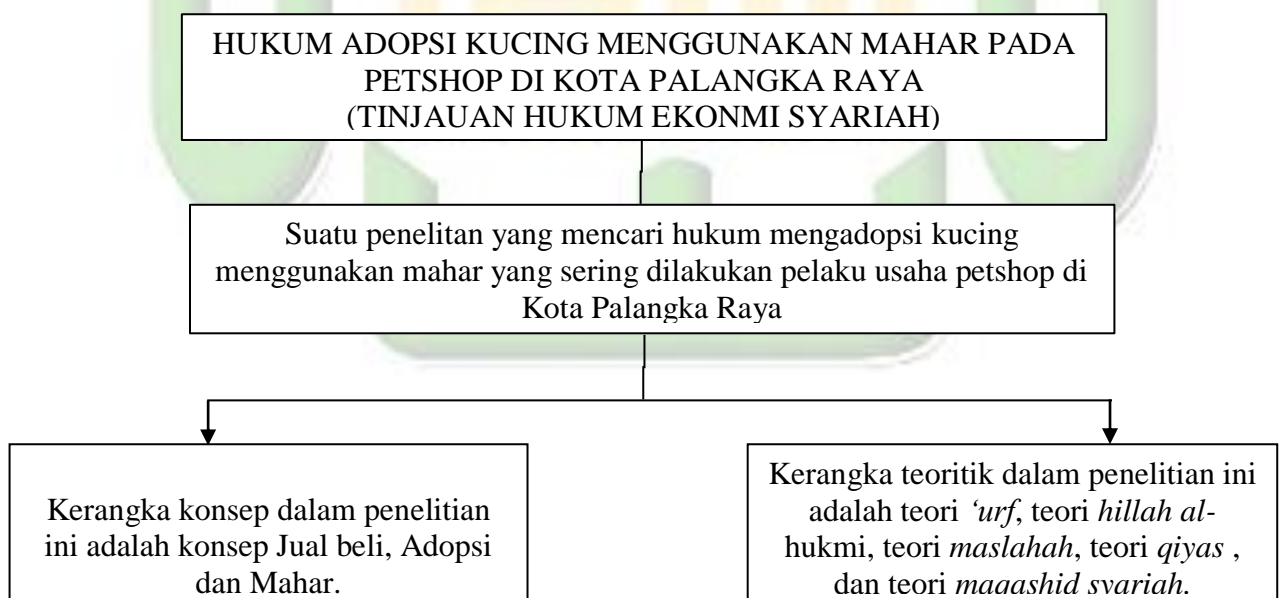
Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

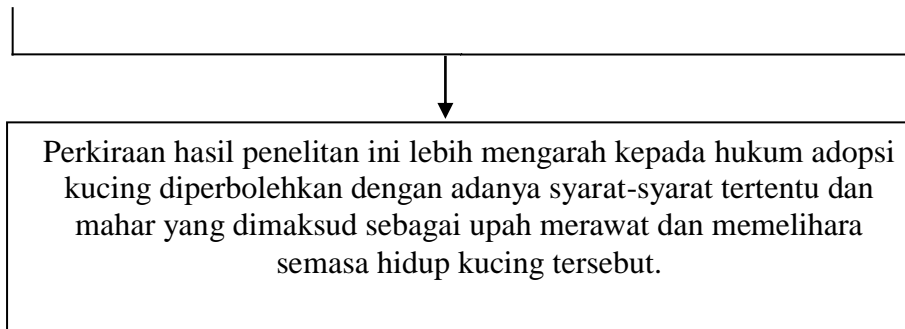
⁷³ Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, *Hubungan Suami Istri dan Perceraian* (Purwokerto : Qaulan Karima), 16-18.

⁷⁴ Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), 82.

D. Kerangka Pikir

Hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangka Raya sesuai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu penelitian yang mencari hukum mengadopsi kucing menggunakan mahar yang sering dilakukan pelaku usaha *petshop* di Kota Palangka Raya. Masalah yang muncul yaitu apakah praktek adopsi kucing diperbolehkan dalam hukum Islam sedangkan ada hadits yang melarang memakan uang dari memperjualbelikan kucing tersebut dan juga mahar hanya ada dalam pernikahan. Konsep dalam penelitian ini yakni konsep Jual Beli, Adopsi dan mahar. Sedangkan teori yang digunakan berupa teori *'Urf*, teori *Hillah al- hukmi*, teori *Maṣlahah*, teori *Qiyas*, dan teori *Maqaṣid asy-Syari'ah*. Perkiraan hasil penelitian ini lebih mengarah kepada hukum adopsi kucing diperbolehkan dengan adanya syarat-syarat tertentu dan mahar yang dimaksud sebagai upah merawat dan memelihara semasa hidup kucing tersebut.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian tentang adopsi kucing ini adalah selama 6 bulan, setelah mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian skripsi. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Berikut adalah tabel penelitian:

Tabel 2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Persiapan:								
	Penyusunan Proposal	x	xxxx	xxx					
	Seminar Proposal				x				
	Revisi Proposal				xx	xx			
2	Penelitian Lapangan					xxx			
3	Hasil dan Analisis						xxxx		
4	Konsultasi Skripsi							xxx	x

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di kecamatan Pahandut dan kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya , dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di Kota Palangka Raya, dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif empiris yang artinya penelitian yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁷⁵ Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai persoalan persepsi pelaku usaha *petshop* di Palangka Raya tentang adopsi kucing yang kemudian dikaitkan secara normatif berupa kajian hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁷⁶ Bogdan dan Taylor dalam Sabian Ustman mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁷ Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung (t.t.: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 6.

⁷⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 382-383.

objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.⁷⁸ Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti dan status hukum persepsi pelaku usaha *petshop* di Palangka Raya tentang adopsi kucing.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah hukum adopsi kucing menggunakan mahar, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha *petshop*. Dalam menentukan subjek penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik pelaku usaha *petshop* beragama Islam, cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan minimal 1 tahun sudah melakukan usaha *petshop* tersebut. Alasan mengambil karakteristik tersebut karena penelitian ini terkait akad yang ditinjau dari hukum Islam dan peneliti rasa cukup minimal 1 tahun sudah mampu menggambarkan praktek adopsi kucing tersebut serta cakap.

D. Sumber Data

Sumber data⁷⁹ dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁷⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)* (Bandung: ALFABETA, 2015), 59.

⁷⁹Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Vol. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 1102. Lihat juga M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 119.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁸⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁸¹

Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁸² Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Hasil wawancara dengan pelaku usaha *petshop* dan MUI Kota Palangkaraya;
- b. Observasi ke *petshop-petshop* untuk melihat langsung keadaan yang diteliti;
- c. Dokumentasi seperti tanda bukti adopsi antara pelaku usaha *petshop* dengan pengadopsi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁸³ Data sekunder mencakup antara lain: dokumen-dokumen,

⁸⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

⁸² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Vol. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

⁸³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983), 56.

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁸⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Buku-buku seperti fiqh muamalah, fiqh munaqahat yang membahas tentang maharnya, ushul fiqh dan lain-lain;
- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian adopsi kucing;
- c. Artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang diteliti.

Bungin dalam Ibrahim pada bukunya Soerjono Soekanto mengatakan:

“observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.”⁸⁵

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁸⁵ Ibid., 81.

hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *Petshop* di Kota Palangka Raya tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun sumber data yang digali menggunakan teknik ini adalah:

- a. Praktik adopsi kucing dengan mahar yang terjadi di *petshop*.
- b. Status hukum adopsi kucing dengan mahar yang dilaksanakan pada *petshop*.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.⁸⁶ Wawancara sendiri dilakukan di Kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁸⁷

Alasan penulis menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Adapun untuk mengungkap praktek dan status hukum adopsi kucing dengan mahar yang dilaksanakan pada *petshop*, hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah mengenai:

⁸⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 105.

⁸⁷ Ibid., 99.

- a. Praktik adopsi kucing dengan mahar yang terjadi *petshop*.
 - 1) Proses adopsi kucing dengan mahar yang terjadi di *petshop*.
 - 2) Awal mula *petshop* mendapatkan kucing yang akan di adopsi.
 - 3) Bukti autentik dalam praktek adopsi kucing.
 - 4) Fungsi mahar dalam praktik adopsi kucing yang terjadi di *petshop*.
- b. Status hukum adopsi kucing dengan mahar yang dilaksanakan pada *petshop*.
 - 1) Fatwa MUI Kota Palangka Raya mengenai adopsi kucing dengan mahar.
 - 2) Hukum adopsi kucing dengan mahar menurut cendikiawan muslim.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.⁸⁸ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun data tertulis melalui dokumen yang ingin peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Profil pelaku usaha *petshop* yang menjadi subjek penelitian ini.

⁸⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Vol. 6 (Bandung: ALFABETA, 2010), 82.

- b. Bukti praktik adopsi yang terjadi antara pelaku usaha *petshop* dengan pengadopsi.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁸⁹ Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut Patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹⁰

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.

⁸⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

⁹⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 125.

3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti, di antaranya:

Pertama, setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka penulis terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Kedua, data yang terkumpul disajikan dengan metode induktif yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang konkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.⁹¹ Artinya, penulis berusaha memaparkan data persepsi pelaku usaha *petshop* di Palangka Raya tentang adopsi kucing yang kemudian dianalisa secara normatif hukum Islam sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

Ketiga, data yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis melalui metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai hukum adopsi kucing dengan mahar pada *petshop* di Kota

⁹¹ Amir Mu'alim dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), 9.

Palangka Raya. Cara kerja metode ini adalah menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak.⁹²

Setelah melakukan tahapan analisis di atas, penelitian ini juga dianalisis melalui hukum Islam baik melalui kajian ushul fikih, kaidah-kaidah fikih atau melalui pendapat ulama terkait dengan adopsi kucing.



⁹² Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang- Undang

Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁹³

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁹⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan

⁹³ Pemerintah Kota Palangka Raya, "Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (18 Januari 2020).

⁹⁴ Ibid.

Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁹⁵

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknyabapak Tjilik Riwayatsebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.⁹⁶

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja PalangkaRaya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁹⁷

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁹⁸

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim

⁹⁸ Ibid.

Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁹⁹

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.¹⁰⁰

2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km². Kota Palangka Raya memiliki 5 kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Batu, kecamatan Jekan Raya, kecamatan Pahandut, kecamatan Rakumpit dan kecamatan Sabangau.¹⁰¹

3. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.¹⁰² Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

¹⁰¹<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENGAH/KOTA%20PALANGKARAYA>. (22 Januari 2020).

¹⁰² Pemerintah Kota Palangka Raya, "Geografis Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (22 Januari 2020).

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹⁰³

¹⁰³ Stanley Adrian, “Demografi Kota Palangka Raya”, dalam <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> (22 Januari 2020).

4. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya

Adapun jumlah penduduk yang peneliti gunakan di sini adalah jumlah penduduk update terakhir pada tanggal 5 maret 2019, yaitu:¹⁰⁴

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Laki-Laki

Kecamatan	Laki-Laki				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pahandut	43.653	45.059	46.494	47.947	49.418
Sabangau	8217	8.482	8.753	9.026	9.303
Jekan Raya	64.760	66.845	68.975	71.131	73.311
Bukit Batu	6.686	6.840	6.996	7.151	7.306
Rakumpit	1.684	1.723	1.762	1.802	1.841
Palangka Raya	125.000	128.949	132.980	137.057	141.179

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Perempuan

Kecamatan	Perempuan				
	2013	2013	2013	2013	2013
Pahandut	41 938	41 938	41 938	41 938	41 938
Sabangau	7 642	7 642	7 642	7 642	7 642
Jekan Raya	62 233	62 233	62 233	62 233	62 233
Bukit Batu	6 185	6 185	6 185	6 185	6 185
Rakumpit	1 502	1 502	1 502	1 502	1 502
Palangka Raya	119 500	119 500	119 500	119 500	119 500

¹⁰⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, "Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya", dalam <https://palangkakota.bps.go.id/statictable/2019/03/05/195/jumlah-penduduk-kota-palangka-raja-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2013-2017.html> (23 Januari 2020).

Tabel 3.3
Jumlah Seluruh Penduduk

Kecamatan	Jumlah				
	2013	2013	2013	2013	2013
Pahandut	85 591	85 591	85 591	85 591	85 591
Sabangau	15 859	15 859	15 859	15 859	15 859
Jekan Raya	126 993	126 993	126 993	126 993	126 993
Bukit Batu	12 871	12 871	12 871	12 871	12 871
Rakumpit	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186
Palangka Raya	244 500	244 500	244 500	244 500	244 500

Kota Palangkaraya terdiri dari berbagai suku di antaranya Dayak, Banjar, Jawa, Melayu, Madura, dan lain sebagainya. Tapi, Suku Dayak yang paling banyak dengan jumlah 46, 62 persen.

Beberapa subetnis Dayak yang terdapat di Kalteng yaitu Ngaju (subetnis terbesar yang mendiami daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan), Bakumpai (mendiami tepian daerah aliran sungai Barito), Maanyan (mendiami bagian timur Kalteng seperti Barito Timur dan Barito Selatan), Ot Danum (mendiami daerah utara Kalteng), dan Siang Murung (mendiami Timur Laut Kalteng/Kabupaten Murung Raya).

Kemudian Taboyan (mendiami sepanjang tepian aliran Sungai Teweh), Lawangan (mendiami bagian timur Kalteng/Barito Timur), Dusun (mendiami wilayah aliran sungai Barito dari Barito Selatan sampai Murung

Raya), dan subetnis lainnya dalam jumlah kecil. Orang Dayak di Kalteng umumnya berprofesi sebagai petani dan pegawai pemerintahan.¹⁰⁵

B. Hasil Penelitian

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria pelaku usaha beragama Islam, lama berjualan lebih dari 1 tahun, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peneliti menentukan beberapa titik pelaku usaha *petshop* secara acak sebagai bahan perbandingan dari setiap komunitas yang ada di kota Palangka Raya.

Peneliti juga menggali data dari anggota MUI Kota Palangka Raya selaku subjek penelitian, di mana sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada anggota MUI Kota Palangka Raya mengenai ada atau tidaknya mengenai fatwa adopsi kucing dan bagaimana status hukumnya. Hal ini peneliti lakukan sebagai landasan agar informasi dan data yang digali dapat dipertanggungjawabkan.;

¹⁰⁵ R Antares P, "Profil Kota Palangka Raya, Caln Ibu Kota Indonesia", dalam <https://www.tagar.id/profil-kota-palangkaraya-calon-ibu-kota-indonesia> (04 Februari 2020).

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang penting terkait hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di kota Palangka Raya. *Pertama*, praktik adopsi kucing ini berjalan di masyarakat dengan pelaksanaannya menggunakan mahar. *Kedua*, pelaku usaha *petshop* menawarkan seekor kucingnya dengan seharga mahar yang akan disepakati antara pelaku usaha *petshop* dengan calon pengadopsi. *Ketiga*, pengadopsi kucing dipersilahkan membawa kucingnya setelah membayar mahar yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik wawancara.

Data hasil wawancara peneliti sajikan sesuai rumusan masalah mengenai tanggapan pelaku usaha *petshop*, pengadopsi dan anggota MUI terhadap pertanyaan penelitian yang peneliti buat sebagai panduan penelitian. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap pelaku usaha *petshop* atas nama inisial AR, DL, NI, AL dan R. Pengadopsi kucing atas nama inisial MAI dan US.

1. Praktik Adopsi Kucing pada *Petshop* di Kota Palangka Raya

a. Pelaku Usaha *Petshop* I

Nama	: DL
Umur	: 28 Tahun
Agama	: Islam
Usia <i>petshop</i>	: sejak 2017
Alamat <i>petshop</i>	: Jl. Rajawali Induk

Responden pertama adalah Ibu DL sebagai pemilik *Petshop*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 Januari 2020 pada pukul 15.00 WIB sampai dengan 15.15 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem adopsi kucing. Ibu DL menyatakan:

“Jadi, kalau di *petshop* sini mas liat kucingnya dulu apabila tertarik bayar maharnya seharga 800 ribu terus silahkan dibawa pulang. Untuk harganya mas tidak bisa dinego. Udah harga pas.”¹⁰⁶

Sistem adopsi yang dilakukan di *petshop* ibu DL ini antara lain:

- 1) Calon pengadopsi memilih kucing yang disediakan oleh ibu DL. Adapun kucing yang disediakan oleh ibu DL pada saat melakukan wawancara ini ada 2 ekor kucing, yaitu 1 ekor kucing jenis persia betina berusia 6 bulan dan 1 ekor kucing berjenis campuran antara peaknose dan american long hair jantan berusia 2,5 bulan.
- 2) Apabila pengadopsi tertarik dengan kucing yang tersedia, pengadopsi membayar maharnya Rp800.000.
- 3) Pengadopsi diperbolehkan membawa pulang kucingnya tersebut.

Peneliti juga menanyakan mengenai asal mula didapatnya kucing yang disediakan ibu DL ini untuk diadopsi. Ibu DL menyatakan:

“Kucing-kucing ini mas ada yang hasil ternak di sini (*petshop*), ada juga beli dari orang lain. Biasanya ada aja orang yang jual kucingnya disini, entah itu kucing yang masih kecil atau sudah dewasa.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara bersama DL pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 pukul 15.00 sampai dengan 15.15 WIB.

¹⁰⁷ Ibid.

Kucing-kucing yang siap diadopsi di *petshop* ibu DL berasal dari 2 sumber, yaitu:

- 1) Ada hasil ternak atau perkawinan dari kucing-kucing yang ada di *petshop* ibu DL seperti kucing jenis persia betina berusia 6 bulan.
- 2) Ada juga hasil adopsi dari orang lain yang menawarkan kucingnya ke ibu DL seperti kucing berjenis campuran antara peaknose dan american long hair jantan berusia 2,5 bulan.

Peneliti juga menanyakan mengenai bukti adopsi kepada ibu DL.

Ibu DL menyatakan:

“disini tidak ada kwitansi-kwitansian mas. Jadi, kami tidak memberi kwitansi kepada pelanggan. Kucingnya langsung dibawa pulang saja. Gitu aja sih mas biasanya.”¹⁰⁸

Praktik adopsi yang terjadi di *petshop* ibu DL tidak memberikan bukti adopsi. Padahal bukti adopsi tersebut merupakan bukti autentik pengadopsi apabila dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak terduga, seperti dicurinya kucing atau semacamnya. Namun, ibu DL dan pengadopsi saling percaya saja bahwa dikemudian hari tidak akan terjadi apa-apa.

b. Pengadopsi Kucing I

Nama : US

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

¹⁰⁸ Ibid.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 1 Februari 2020 pada pukul 09.03 WIB sampai dengan 09.13 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem adopsi kucing yang pernah dilakukan US. US menyatakan:

“dulu pernah adopsi kucing di *petshop* kak., tapi sudah lama. Prosesnya dulu itu aku liat kucing-kucing yang di *post* kok lucu di *facebook* itu. Lalu aku *chat* adminnya nanya-nanya. Terus sampai akhirnya aku mau adopsi kucing itu di suruh datang ke *petshop* untuk liat kucingnya langsung. Ada nego-nego sedikit, terus bayar maharnya Rp800.000, *COD* (cash on delivery)¹⁰⁹ gitu. terus aku bawa pulang deh kucingnya”.¹¹⁰

Proses adopsi kucing yang pernah dilakukan oleh US pada *petshop*, yaitu:

- 1) US pertama meliat unggahan foto-foto kucing yang siap adopsi oleh akun *petshop* di sosial media (*facebook*).
- 2) US menanyakan mengenai kucing-kucing tersebut ke admin akun *petshop* dengan cara menghubunginya melalui *messenger* (salah satu fitur yang ada di *facebook*).
- 3) US berkunjung ke *petshop*nya di Jl. Rajawali Induk untuk meliat secara langsung kucing tersebut. Kucing yang ingin di adopsi US itu adalah kucing berjenis campuran antara kucing jenis peaknose dengan kucing jenis persia. Pada saat adopsi, kucing tersebut berusia 4 bulan dan berkelamin betina.

¹⁰⁹ *COD* (cash on delivery) merupakan salah satu transaksi online yang mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk menentukan harga barang yang telah ditawarkan penjual secara online tersebut.

¹¹⁰ Wawancara bersama US pada hari Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 09.03 sampai dengan 09.13 WIB.

- 4) Setelah melihat kondisi kucing tersebut, US memberikan mahar Rp800.000 yang telah disepakati bersama kepada pemilik *petshop*.
- 5) Setelah menyerahkan mahar, Kucingnya diperbolehkan dibawa pulang.

Peneliti juga menanyakan mengenai bukti adopsi kepada US. US menyatakan:

“setelah menyerahkan mahar itu, tidak ada diberi kwitansi atau nota pembayaran gitu kak oleh *petshop*nya. Akunya juga tidak ada minta sih. Langsung aku bawa pulang aja kucingnya”.¹¹¹

Dari pernyataan US tersebut dapat dilihat bahwa *petshop* tidak memberikan bukti autentik kepada pengadopsi sebagai bukti adopsi. Padahal bukti adopsi dapat menjadi bukti kepemilikan yang mana apabila terjadi pencurian kucing atau kehilangan kucing atau semacamnya. Maka, bukti adopsi tersebut dapat menjadi bukti kepemilikan si pengadopsi terhadap kucing tersebut.

c. Pelaku Usaha *Petshop* II

Nama : NI
 Umur : 26 Tahun
 Agama : Islam
 Usia *petshop* : sejak 2018
 Alamat *Petshop* : Jl. Nyai Undang

Responden kedua adalah Ibu NI sebagai pemilik *Petshop*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 Januari 2020 pada

¹¹¹ Ibid.

pukul 14.29 WIB sampai dengan 14.45 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem adopsi kucing. Ibu NI menyatakan:

“disini sistemnya sama seperti adopsi kucing pada umumnya, mas. Tapi sisa 1 ekor saja lagi kucing jenis persia usia 2,5 bulan kelaminnya jantan, 650 ribu mas. Saya kalau ada pelanggan kesini mencari kucing mau itu adopsi atau beli saya persilahkan saja, yang penting bayar aja mas”.¹¹²

Dari pernyataan ibu NI tersebut dapat kita lihat bahwa masih ada pemilik *petshop* yang tidak mengetahui tentang perbedaan antara jualbeli dengan adopsi, yang terpenting bagi pelaku usaha *petshop* memperoleh keuntungan dari kucing tersebut.

Untuk mengenai proses adopsinya, ibu NI memaparkan bahwa proses adopsi yang dilakukan di *petshop* ibu NI sama dengan proses adopsi yang dilakukan oleh *petshop-petshop* lain, yaitu:

- 1) Calon pengadopsi memilih kucing yang disediakan oleh ibu NI. Adapun kucing yang disediakan oleh ibu NI pada saat melakukan wawancara ini hanya tersisa 1 ekor kucing, yaitu kucing jenis persia jantan berusia 2,5 bulan.
- 2) Apabila pengadopsi tertarik dengan kucing yang tersedia, pengadopsi membayar maharnya Rp650.000.
- 3) Pengadopsi diperbolehkan membawa pulang kucingnya tersebut

Peneliti juga menanyakan mengenai asal mula didapatnya kucing yang disediakan ibu NI ini untuk diadopsi. Ibu NI menyatakan:

¹¹² Wawancara bersama NI pada hari Minggu, 26 Januari 2020 pukul 14.29 sampai dengan 14.45 WIB.

“kucing-kucing disini hasil dari perkawinan yang ada disini aja, mas. Contohnya kucing persia jantan itu. Didalam juga ada 1 kucing hamil, sekitar bulan maret atau april baru melahirkan. Apabila ada pelanggan yang ingin mengawinkan kucingnya dengan kucing disini juga boleh. Mas. Nanti hasil anaknya bisa dibagi 2 sesuai kesepakatan aja”.¹¹³

Menurut keterangan ibu NI bahwa kucing-kucing yang disediakan ibu NI untuk diadopsi itu berasal dari hasil perkawinan kucing-kucing yang ada di *petshop* ibu NI. Namun, ada juga kucing-kucing hasil dari perkawinan kucing ibu NI dengan orang lain.

Peneliti juga menanyakan mengenai bukti adopsi kepada ibu NI.

Ibu NI menyatakan:

“kalau sudah sepakat dengan maharnya tadi, biasanya langsung dibawa pulang aja kucingnya, mas. Untuk kwitansi atau nota gitu kami biasanya tidak memberi sih. Emang tidak ada kami persiapkan juga”.¹¹⁴

Praktik adopsi yang terjadi di *petshop* ibu NI tidak memberikan bukti adopsi. Padahal bukti adopsi tersebut merupakan bukti autentik pengadopsi apabila dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak terduga, seperti dicurinya kucing atau semacamnya. Namun, ibu NI dan pengadopsi saling percaya saja bahwa dikemudian hari tidak akan terjadi apa-apa.

d. Pengadopsi Kucing II

Nama : MAI

Umur : 22 Tahun

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 1 Februari 2020 pada pukul 11.06 WIB sampai dengan 11.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem adopsi kucing yang pernah dilakukan MAI. MAI menyatakan:

“pertama kali aku mau punya kucing itu, aku liat-liat dulu di *facebook*. Terus dapat *post*-an kucing bagus dari *petshop*. Oleh aku belum tau apa-apa mengenai kucing, aku langsung suka aja dengan kucingnya dan murah. Dulu itu kucing mix angora dengan persia, betina, dan sudah tua 1 tahun umurnya. Terus Aku hubungi lewat pesan *facebook*. Terus ketemuan di *Petshopnya* untuk nego, harganya itu jadi Rp300.000. Sampai 3 bulan sekalinya mati kucingnya”.¹¹⁵

Proses adopsi kucing yang pernah dilakukan oleh US pada *petshop*, yaitu:

- 1) MAI pertama meliat unggahan foto-foto kucing yang siap adopsi oleh akun *petshop* di sosial media (*facebook*).
- 2) MAI menanyakan mengenai kucing-kucing tersebut ke admin akun *petshop* dengan cara menghubunginya melalui *messenger* (salah satu fitur yang ada di *facebook*).
- 3) MAI berkunjung ke *petshopnya* di Jl. Nyai Undang untuk meliat secara langsung kucing tersebut. Kucing yang ingin di adopsi MAI itu adalah kucing berjenis campuran antara kucing jenis angora dengan

¹¹⁵ Wawancara bersama MAI pada hari Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 11.06 sampai dengan 11.30 WIB.

kucing jenis persia. Pada saat adopsi, kucing tersebut berusia 1 tahun dan berkelamin betina.

- 4) Setelah melihat kondisi kucing tersebut, MAI memberikan mahar Rp300.000 yang telah disepakati bersama kepada pemilik *petshop*.
- 5) Setelah menyerahkan mahar, Kucingnya diperbolehkan dibawa pulang.

Peneliti juga menanyakan mengenai bukti adopsi kepada MAI.

MAI menyatakan:

“jarang ada kwitansi-kwitansi atau nota gitu bel, dulu aku tidak ada diberi seperti itu. Jadi, aku menyerahkan mahar, orangnya menyerahkan kucing. Setelah itu selesai”¹¹⁶

Dari pernyataan MAI tersebut dapat dilihat bahwa *petshop* tidak memberikan bukti autentik kepada pengadopsi sebagai bukti adopsi. Padahal bukti adopsi dapat menjadi bukti kepemilikan yang mana apabila terjadi pencurian kucing atau kehilangan kucing atau semacamnya. Maka, bukti adopsi tersebut dapat menjadi bukti kepemilikan si pengadopsi terhadap kucing tersebut.

e. Pelaku Usaha *Petshop* III

Nama	: AR
Umur	: 40 Tahun
Agama	: Islam
Usia <i>petshop</i>	: sejak 2012
Alamat <i>petshop</i>	: Jl. Seth Adji

¹¹⁶ Ibid.

Responden ketiga adalah Bapak AR sebagai pemilik *Petshop*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 Januari 2020 pada pukul 15.01 WIB sampai dengan 15.20 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem adopsi kucing. Bapak AR menyatakan:

“adopsi atau jual beli sama aja mas, semua jenis kucing disini bisa diadopsi atau jual beli. Harganya beda-beda mas tergantung jenis kucingnya dan usianya, tapi sekarang cuma ada kucing dewasa sih. Untuk prosesnya seperti biasa aja, mas”.¹¹⁷

Sistem adopsi yang dilakukan di *petshop* bapak AR ini sama seperti yang dilakukan *petshop-petshop* pada umumnya, antara lain:

- 1) Calon pengadopsi memilih kucing yang disediakan oleh bapak AR. Adapun kucing yang disediakan oleh bapak AR pada saat melakukan wawancara ini ada 6 ekor kucing dewasa, contohnya kucing jenis himalaya biasa dan kucing jenis himalaya mesir.
- 2) Apabila pengadopsi tertarik dengan kucing yang tersedia, pengadopsi membayar maharnya sesuai jenis kucingnya contoh mahar untuk kucing jenis himalaya mesir itu Rp1.500.000 dan himalaya biasa Rp900.000.
- 3) Pengadopsi diperbolehkan membawa pulang kucingnya tersebut.

Peneliti juga menanyakan mengenai asal mula didapatnya kucing yang disediakan bapak AR ini untuk diadopsi. Bapak AR menyatakan:

“Kucing-kucing disini asalnya kami ambil ada yang dari Banjar, ada juga dari orang yang jual ke kami, mas.pernah juga ambil

¹¹⁷ Wawancara bersama AR pada hari Minggu, 26 Januari 2020 pukul 15.01 sampai dengan 15.20 WIB.

kucing dari Surabaya, tapi mahal banget biayanya. Kalau pengiriman lewat pesawat, 1 kucing itu 1 tiket loh, mas. Jadi sekarang kami ambil kucingnya dari banjar aja kebanyakan.”¹¹⁸

Kucing-kucing yang siap diadopsi di *petshop* bapak AR berasal dari 2 sumber, yaitu:

- 1) Ada kucing-kucing yang berasal dari salah satu *petshop* di Banjarmasin yang dibeli bapak AR.
- 2) Ada juga hasil adopsi dari orang lain yang menawarkan kucingnya ke bapak AR seperti kucing berjenis himalaya mesir berkelamin betina usia 6 bulan.

Peneliti juga menanyakan mengenai bukti adopsi kepada bapak AR. Bapak AR menyatakan:

“Kami tidak menyediakan kwitansi mas, cuma pakai nota toko yang berstempel aja sebagai lepas adopsi atau jual beli. Karena sering ada laporan pencurian kucingan mas, makanya setiap toko *petshop* harus di pasang cctv untuk memantau apabila ada pencuri yang jual kucing curian. Kami juga apabila ada yang jual kucing minta nota dari mana kucing ini diadopsi atau di beli.”¹¹⁹

Praktik adopsi yang terjadi di *petshop* bapak AR memberikan bukti adopsi. Bukti adopsinya berupa nota toko yang sudah berstempel. Bukti adopsi tersebut merupakan bukti autentik pengadopsi apabila dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak terduga, seperti dicurinya kucing atau semacamnya.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

f. Pelaku Usaha *Petshop* IV

Nama : AL

Umur : 39 Tahun

Agama : Islam

Usia *petshop* : sejak 2018

Alamat *petshop* : Jl. Tjilik Riwut Km. 1,5.

Responden keempat adalah Bapak AL sebagai pemilik *Petshop*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 10 April 2020 pada pukul 09.01 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem adopsi kucing. Bapak AL menyatakan:

“sistem adopsi kucing disini sama seperti sistem adopsi di *petshop-petshop* yang lain, mas. Kalau mas-nya tertarik dengan kucing yang ada disini, mas tinggal bayar maharnya, seperti itulah sistem adopsinya”¹²⁰

Sistem adopsi yang dilakukan di *petshop* bapak AL ini sama seperti yang dilakukan *petshop-petshop* yang ada di Kota Palangka Raya, antara lain:

1) Calon pengadopsi memilih kucing yang disediakan oleh bapak AL.

Adapun kucing yang disediakan oleh bapak AL pada saat melakukan wawancara ini ada 1 ekor kucing dewasa jenis anggora.

¹²⁰ Wawancara bersama AL pada hari Jumat, 10 April 2020 pukul 09.01 sampai dengan 10.00 WIB.

- 2) Apabila pengadopsi tertarik dengan kucing yang tersedia, pengadopsi membayar maharnya sesuai jenis kucingnya. Contoh mahar untuk kucing jenis angora itu Rp450.000.
- 3) Pengadopsi diperbolehkan membawa pulang kucingnya tersebut.

Peneliti juga menanyakan mengenai asal mula didapatnya kucing yang disediakan bapak AL ini untuk diadopsi. Bapak AL menyatakan:

“kucingnya ada yang mesan dari Banjarmasin, ada juga ditenak disini. Kami juga menyediakan jasa perkawinan kucing. Misalnya ada orang yang kucingnya ingin kawin dan tidak memiliki pasangan. Nah kami bisa membantu proses perkawinannya dengan kucing kami.”¹²¹

Kucing-kucing yang siap diadopsi di *petshop* bapak AL berasal dari 2 sumber, yaitu:

- 1) Ada kucing-kucing yang berasal dari salah satu *petshop* di Banjarmasin yang dibeli bapak AR.
- 2) Ada juga hasil ternak sendiri di *petshop* bapak AL.

Peneliti juga menanyakan mengenai bukti adopsi kepada bapak AL. Bapak AL menyatakan:

“biasanya kami beri Nota pembelian aja, mas. Sebagai bukti adopsinya”¹²²

Praktik adopsi yang terjadi di *petshop* bapak AL memberikan bukti adopsi. Bukti adopsinya berupa nota toko. Bukti adopsi tersebut merupakan bukti autentik pengadopsi apabila dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak terduga, seperti dicurinya kucing atau semacamnya.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

g. Pelaku Usaha *Petshop* V

Nama : R
 Umur : 36 Tahun
 Agama : Islam
 Usia *petshop* : sejak Januari 2019
 Alamat *petshop* : Jl. Sisingamangaraja

Responden kelima adalah Ibu R sebagai pemilik *Petshop*. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 13 April 2020 pada pukul 13.11 WIB sampai dengan 13.50 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sistem adopsi kucing. Ibu R menyatakan:

“kalau mas mau mengadopsi kucing, kami menyediakan kontak hp yang bisa dihubungi. Ini no. Pemilik kucingnya. Nanti mas kontek-kontekan saja dengan mbanya. Kucing-kucing yang ini juga punya mbanya”¹²³

Sistem adopsi yang dilakukan di *petshop* ibu R ini hanya menyediakan no. Kontak pemilik kucingnya. Jadi, apabila ada calon pengadopsi kucing datang, langsung bisa tawar menawar dengan pemilik kucingnya melalui *whatsApp* atau janji ketemu langsung.

“di *petshop* ini, kami hanya menjual bahan makanan hewan peliharaan, kandang dan aksesoris lainnya, mas”¹²⁴

¹²³ Wawancara bersama R pada hari Senin, 13 April 2020 pukul 13.11 sampai dengan 13.50 WIB.

¹²⁴ Ibid.

2. Hukum Penggunaan Mahar dalam Praktik Adopsi Kucing pada

Petshop di Kota Palangka Raya

Wawancara selanjutnya terkait hukum penggunaan mahar dalam praktik adopsi kucing pada *petshop* di Kota Palangka Raya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kota Palangka Raya atas nama dengan inisial ZA.

Nama : ZA

Umur : 53 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : Ketua Umum MUI Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Februari 2020 pada pukul 13.15 WIB sampai dengan 13.57 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai penggunaan mahar dalam praktik adopsi kucing pada *petshop* di Kota Palangka Raya. Bapak ZA menyatakan:

“yang jelas memelihara kucing hukumnya tidak haram, boleh. Kan ada sahabat Nabi SAW. yang banyak meriwayatkan hadits namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan digelar bapaknya kucing karna beliau itu banyak memelihara kucing dizamannya Rasulullah. Termasuk Rasulullah sendiri sayang juga dengan kucing. Jadi, kalau menilik dari itu sahabat Nabi SAW. yang senantiasa dekat dengan Nabi SAW. banyak memelihara kucing. Jadi, istilahnya mengadopsi atau memelihara kucing itu boleh. Kemudian, kucing ini memang termasuk binatang yang tidak boleh di konsumsi, hukumnya haram karna kucing ini memakan mangsanya itu dengan tangannya. Lain halnya dengan ayam langsung dengan paruhnya. Jadi karna binatang itu haram dimakan, misalkan bulunya tidak sengaja masuk didalam saku baju maka tidak sah baju itu dibawa sholat. Karna kucing itu termasuk binatang yang tidak boleh dimakan, nah tapi untuk memeliharanya boleh. Pertanyaan mahar tadi. Mahar itukan biasanya untuk

perkawinan. Inikan sebenarnya tidak boleh kucing itu dibeli. Karna jual beli benda najis itu kan tidak sah hukumnya. Jadi, salah atu bentuknya dengan mahar. Jadi sebenarnya mahar itu boleh. Kalau dalam bahasa banjar itu *behurupan*¹²⁵. *Behurupan* duit dengan kucing. Termasuk sekarang ini kan seperti jual-jual cacing, kodok, atau umpan ikan kalau di banjar daerah kalsel, *behurupan*. Jadi, sebenarnya mahar itu menghindari daripada tidak boleh jual beli. Jadi, boleh saja mahar itu bukan berarti perkawinan. Tapi mahar untuk menghalalkan kita mengambil kucing atau mengadopsi kucing tadi”¹²⁶

Islam tidak melarang umatnya untuk memelihara kucing. Karna Nabi Muhammad SAW. juga memelihara kucing. Bahkan sampai ada sahabat Nabi SAW. yang sering meriwayatkan hadits dan banyak memelihara kucing, yaitu Abu Hurairah. Namun, kucing haram untuk dikonsumsi karena kucing memakan mangsanya menggunakan cakar dan memiliki taring. Oleh karena itu, kucing juga termasuk hewan najis dalam hal dikonsumsi dan diperjualbelikan.

Karena kucing termasuk hewan najis dalam hal diperjualbelikan maka hukum jual beli kucing itu tidak sah karena salah satu syarat benda yang diperjualbelikan adalah suci. Untuk menghndari tidak sahnya, maka perlu menggunakan mahar. Jadi, praktik adopsi kucing menggunakan mahar berbeda dengan praktik jual beli kucing.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai hukum adopsi kucing menggunakan mahar kepada bapak ZA. Menurut bapak ZA adalah:

“Memang para ulama itu karena urusan fikih itu luas. Ada yang mengatakan makhruih tanzih dan ada juga yang haram. Maka untuk menghilangkan keragu-raguan itu menggunakan mahar. Hadits ada

¹²⁵ Behurupan merupakan bahasa Banjar yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang senilai secara ikhlas.

¹²⁶ Wawancara bersama ZA pada hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 13.15 sampai dengan 13.57 WIB.

juga mengatakan: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Supaya tidak ragu-ragu, ambil yang mahar tadi. Jadi istilah jual beli tidak ada, ambil mahar aja. Nah ini duit Rp100.000, saya ambil kucingnya mahar Rp100.000. atau bisa juga disebut *behurupan* dalam bahasa banjaranya. Kalau msalnya masih ragu-ragu mengenai hukumnya, makhruh tanzih. Kalau memang kita mengkut makhruh tanzih, tidak apa-apa. Karena makhruh tanzih tidak berdosa juga. Kalau ingin yakin, pakai mahar tadi. Tapi pada intinya memelihara kucing itu boleh, bagus saja.”¹²⁷

Menurut bapak ZA bahwa istilah adopsi kucing dengan mahar berbeda dengan istilah jual beli kucing. Karena banyak pendapat ulama mengenai hukum jual beli kucing ini, salah satunya ada yang mengatakan makhruh tanzih. Menurut bapak ZA itu merupakan masih sebuah keragu-raguan. Oleh karena itu, untuk menghindari keragu-raguan maka gunakanlah mahar. Jadi, hukum adopsi kucing menggunakan mahar itu boleh karena menggunakan konsep *behurupan*.

Peneliti menanyakan mengenai sudah ada atau tidak adanya fatwa yang mengatur tentang adopsi kucing menggunakan mahar ini. Bapak ZA menjawab:

“sementara ini belum ada lagi fatwa. Cuman yang jelaskan berdasarkan hadits, berdasarkan fakta, ya kebanyakan orang yang memelihara kucing dan juga ceramah-ceramah Guru Sekumpul itukan apabila bulunya kucing itu terkena baju dalam jumlah banyak maka tidak sah dibawa sholat. Namun, apabila bulunya Cuma 1 atau helai saja contohnya seperti darah itukan najis, tapi apabila darah nyamuk saja itu tidak najis. Yang menjadi najis itu apabila darahnya mengalir. Nah itulah qiyasannya”¹²⁸

MUI Kota Palangka Raya belum ada mengeluarkan fatwa mengenai adopsi kucing menggunakan mahar ini. Namun melihat dari

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

penjelasan bapak ZA diatas bahwa memelihara kucing itu diperbolehkan saja asalkan tetap memperhatikan kebersihan kucingnya baik itu kotoran maupun bulunya, karena kotoran kucing itu tetap najis dan bulunya apabila banyak terkena baju atau pakaian kita. Maka, pakaian itu tidak sah dipakai saat sholat.

C. Analisis

Pembahasan tentang hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangka Raya tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, latar belakang adopsi kucing dengan mahar menurut pelaku usaha *petshop* di kota Palangka Raya. *Kedua*, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik adopsi kucing dengan mahar di kota Palangka Raya.

1. Latar Belakang Adopsi Kucing Menggunakan Mahar pada *Petshop* di Kota Palangka Raya

Adopsi kucing menggunakan mahar yang terjadi pada *Petshop-Petshop* di Kota Palangka Raya merupakan praktik tukar menukar kucing ras seperti ras anggora, himalaya, persia, dan lain-lain dengan mahar tertentu yang awalnya ditentukan oleh pelaku usaha *petshop* yang biasanya berupa uang. Praktik adopsi kucing menggunakan mahar ini sudah marak terjadi di Kota Palangka Raya karena tingginya minat masyarakat untuk memelihara kucing lucu tersebut. Mereka yang memiliki minat tinggi memelihara kucing tersebut dari usia anak-anak hingga dewasa.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha *petshop* mengenai sistem adopsi kucing menggunakan mahar, keempat responden menyatakan menggunakan sistem adopsi kucing yang sama, yaitu:

- a. Calon pengadopsi memilih kucing yang disediakan oleh pelaku usaha *Petshop*.
- b. Apabila pengadopsi tertarik dengan kucing yang tersedia, pengadopsi membayar maharnya.
- c. Pengadopsi diperbolehkan membawa pulang kucingnya tersebut.

Namun, hanya *petshop* R yang menggunakan sistem adopsi kucing berbeda, yaitu dengan menyiapkan no. Kontak pemilik kucingnya untuk melakukan adopsi kucing langsung dengan pemilik kucingnya.

Dari penjelasan responden tersebut, ada 2 orang yang berakad dalam praktik adopsi kucing, yaitu pelaku usaha *petshop* dan pengadopsi kucing. Dan saling mengikatkan diri untuk menyerahkan kucing, dan pihak lain untuk membayar mahar yang sudah diperjanjikan. Praktik adopsi kucing dikatakan telah selesai ketika pelaku usaha *petshop* dan pengadopsi mencapai kata sepakat dengan mahar yang ditentukan. Hal tersebut termasuk konsep jual beli yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dan 1458 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang

sudah diperjanjikan.¹²⁹ Dengan demikian, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* menggunakan konsep jual beli.

Mengenai syarat-syarat objek yang boleh diperjualbelikan dalam Islam, antara lain:¹³⁰

- a. Suci, Adapun yang dimaksud suci, bahwa yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan. Menilik dari kisah Nabi Muhammad SAW. yang menyayangi kucingnya, bahkan diberi nama yaitu Muezza. Kucing boleh dipelihara dan diadopsi dari jalanan. Kucing termasuk binatang yang suci badan dan air liurnya. Namun, kucing termasuk golongan binatang najis untuk dikonsumsi karena kucing memakan mangsa dengan tangannya dan memiliki taring.
- b. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, dari hasil wawancara dengan responden, kucing-kucing yang disediakan merupakan milik si pelaku usaha *petshop*nya sendiri.
- c. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Bagi para pengadopsi memelihara kucing menimbulkan kesenangan dan

¹²⁹ Tim Permata Press, *Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA* (Yogyakarta: PERMATA PRESS, 2010), 342.

¹³⁰ MS. Wawan Djunaedi, *Fikh* (Jakarta: PT. Listfariska Putra, 2008), 98.

menghilangkan stres. Selain dapat menghibur majikannya, kucing juga dapat menangkap tikus dan serangga-serangga kecil yg mengganggu dirumah. Sehingga, rumah jadi terhindar dari hama. Secara syara', kucing memiliki manfaat yang tidak melanggar syara' sekalipun.

- d. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai, pada praktik adopsi kucing yang terjadi di Palangka Raya, kucing-kucing yang akan diadopsi di pajang di depan toko *petshop*. Sehingga, para pengadopsi dapat melihat secara jelas kondisi dan kesehatan kucing secara langsung.
- e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya, para pengadopsi dapat mengetahui kesehatan, jenis, dan sifat kucing yang akan di adopsi dari catatan kesehatan setiap kucing yang akan di adopsi. Dan besar maharnya tergantung jenis kucing dan pelaku usaha *petshopnya* karena tidak ada patokan besar mahar kucing.

Dari kelima syarat objek yang boleh diperjualbelikan, kucing termasuk hewan yang suci dan memilki manfaat bagi pengadopsi. Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaatnya karena sesuatu yang tidak punya manfaat tidak ada nilainya.¹³¹ Selama kucing memberikan manfaat, maka kucing termasuk objek yang boleh diperjual belikan selama kucing tersebut untuk dipelihara dan bukan untuk dikonsumsi karena hukum mengonsumsi kucing adalah haram.

Untuk besar mahar dari setiap jenis kucing terdapat perbedaan. Semakin bagus jenis kucingnya, maka semakin besar pula besar maharnya.

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 5 (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 118.

Dan juga tidak terdapat patokan besar mahar pada setiap jenis kucing tersebut. Jadi, ada perbedaan besar mahar jenis kucing antar *petshop* walaupun jenis kucingnya sama. Contoh kucing persia yang disediakan DL maharnya lebih besar daripada mahar kucing persia yang disediakan NI.

Pada konsep mahar dalam Islam, bahwa mahar itu termasuk *shadaq* atau pemberian secara ikhlas. Sehingga, tidak adanya batas minimal dan maksimal dalam mahar. Pada praktik adopsi kucing, mahar dimaksud sebagai upah pelaku usaha *petshop* merawat dan menjaga kucing. Oleh karena itu, adanya perbedaan besar mahar dari setiap toko *petshop* walaupun jenis kucing yang diadopsi itu sama.

Sesuatu dapat dikatakan mahar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³²

- a. Harta berharga. Mahar yang biasanya diberikan pengadopsi kepada pelaku usaha *petshop* berupa uang tunai. Uang memiliki nilai dan termasuk harta kekayaan.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Uang termasuk barang yang suci dan bisa diambil manfaat karena memiliki nilai dan digunakan dalam berbagai transaksi muamalah.
- c. Brangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya barang curian. Selama uang yang diberikan pengadopsi adalah milik sendiri, maka mahar tetap sah.

¹³² Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, *Hubungan Suami Istri dan Perceraian* (Purwokerto: Qaulan Karima), 16-18.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Praktik adopsi kucing menggunakan mahar di Kota Palangka Raya melakukan akad langsung antara pelaku usaha *petshop* dengan pengadopsi tanpa perantara apapun. Hal tersebut telah diungkapkan langsung oleh US dan MAI selaku pengadopsi bahwa mereka menyerahkan mahar secara langsung kepada pelaku usaha *petshop* dan mengambil kucingnya di *petshop*.

Dalam hal asal mula didapatnya kucing-kucing yang disediakan *petshop-petshop* itu berbeda-beda. *Petshop* DL menyediakan kucing-kucing yang siap diadopsi berasal dari hasil ternak sendiri dan penjualan kucing oleh orang lain yang dijual kembali DL. *Petshop* NI menyediakan kucing-kucing yang siap diadopsi berasal dari ternak sendiri. *Petshop* AR menyediakan kucing-kucing yang siap diadopsi berasal dari pembelian kucing di Banjarmasin dan penjualan kucing oleh orang lain yang dijual kembali. Sedangkan, *petshop* AL menyediakan kucing-kucing yang siap adopsinya itu sebagian berasal dari pembelian di Banjarmasin dan ada juga hasil ternak sendiri.

Melihat dari asal mula didapatnya kucing-kucing ras tersebut dalam konsep adopsi hewan, pelaku usaha *petshop* termasuk peternak (*breeder*). Karena mereka memelihara sendiri, membeli ke Banjarmasin, dan ada juga membeli dari pecinta kucing yang menjual kucingnya. peternak (*breeder*) memang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari praktik adopsi kucing tersebut.

Mengenai bukti autentik telah melakukan praktik adopsi kucing, *petshop* DL dan *petshop* NI sama-sama tidak memberikan bukti autentik apapun kepada pengadopsi sebagai tanda bukti telah mengadopsi kucing tersebut. Sedangkan *petshop* AR dan *petshop* AL memberikan bukti autentik kepada pengadopsi berupa nota pembelian yang berstempel toko.

Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi pengadopsi mengenai sistem adopsi kucing yang pernah dilakukan. US dan MAI pernah melakukan praktik adopsi kucing menggunakan mahar yang mana sistemnya sama, yaitu:

- a. Pengadopsi pertama melihat unggahan foto-foto kucing yang siap adopsi oleh akun *petshop* di sosial media (*facebook*).
- b. Pengadopsi menanyakan mengenai kucing-kucing tersebut ke admin akun *petshop* dengan cara menghubunginya melalui *messenger* (salah satu fitur yang ada di *facebook*).
- c. Pengadopsi berkunjung ke *petshop*nya.
- d. Setelah melihat kondisi kucing tersebut, pengadopsi memberikan mahar yang telah disepakati bersama kepada pemilik *petshop*.
- e. Setelah menyerahkan mahar, Kucingnya diperbolehkan dibawa pulang

Mengenai besar mahar, US dan MAI tidak sama karena memang mengadopsi kucingnya di *petshop* yang berbeda pula. Hal ini membuktikan bahwa memang tidak ada patokan mahar pada kucing tersebut.

US dan MAI juga mengaku bahwa tidak diberi bukti autentik apapun dari *petshop* sebagai bukti telah melakukan praktik adopsi kucing. Jadi,

setelah melakukan penyerahan mahar yang telah disepakati antara pengadopsi dan pelaku usaha *petshop*. Maka, kucing tersebut langsung dibawa pulang saja.

Hemat peneliti, berdasarkan uraian dari penjelasan diatas hal yang menjadi fokus pembahasan dari latar belakang adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangka Raya adalah praktik adopsi kucing yang berjalan pada *petshop-petshop* di Kota Palangka Raya. Yang mana para pelaku usaha *petshop* menggunakan kata adopsi kucing untuk memperhalus jual beli kucing dan mahar yang dimaksud dalam praktik tersebut adalah upah merawat dan menjaga selama kucing itu di *petshop*.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Adopsi Kucing Menggunakan Mahar pada *Petshop* di Kota Palangka Raya

a. Praktik Adopsi Kucing menggunakan Mahar pada *Petshop* di Kota Palangka Raya dari sisi *Hillah al-Hukmi*

Semakin banyaknya minat masyarakat Kota Palangka Raya untuk memelihara kucing, semakin berkembang pula usaha *petshop* yang ada di Kota Palangka Raya. Pada awalnya *petshop* hanya merupakan tempat usaha yang menyediakan kebutuhan hewan peliharaan seperti makanan, pelayanan jasa pentipan dan perawatan hewan peliharaan. Kini *petshop* juga menyediakan hewan peliharaan untuk dibeli pelanggan. Masyarakat Kota Palangka Raya menyebut jual beli kucing ini dengan sebutan adopsi kucing menggunakan mahar.

Dalil yang melarang melakukan jual beli kucing terdapat pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim No. 1569, menjelaskan bahwa akan larangan memperjualbelikan binatang peliharaan anjing dan kucing. Adapun hadits tersebut adalah:

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ؟ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

Artinya:

aku bertanya kepada Jabir tentang hasil penjualan anjing dan kucing, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam melarang hal tersebut.

Mengenai hadits tersebut terjadi *khilafiyah* dari para ulama. Karena hadits diatas tidak hanya diriwayatkan oleh Muslim saja. Namun, hadits serupa juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal.

Disimpulkan bahwa keseluruhan hadits ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *tsiqah*¹³³, kecuali Ibnu Lahi'ah dari jalur Ahmad bin Hanbal di nilai *da'if*. Namun, derajatnya dapat naik menjadi *hasan ligairihi*¹³⁴ karena dikuatkan oleh perawi-perawi yang lebih *tsiqah* dalam riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizdi dan Nasa'i.¹³⁵

¹³³ *Tsiqah* adalah satu kata dalam Ilmu Rijal yang menunjukkan dipercayanya seorang perawi. *Tsiqah* berfungsi untuk mengetahui dan membedakan para perawi yang dapat dipercaya dari para perawi pendusta dan pemalsu hadits. Lihat Noor Laila M Habibah, "Larangan jual beli anjing dan kucing : studi ma'anī al-ḥadīṣ" (Skripsi- UIN Walisongo Semarang, 2017), 21.

¹³⁴ *hasan lighairihi* adalah hadis *da'if* yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak dikenal identitasnya dan menyembunyikan cacat dapat naik derajatnya menjadi *hasan* karena di bantu oleh hadis-hadis lain yang semakna atau banyak perawi yang meriwayatkannya. Lihat Noor Laila M Habibah, "Larangan jual beli anjing dan kucing : studi ma'anī al-ḥadīṣ" (Skripsi- UIN Walisongo Semarang, 2017), 76.

¹³⁵ Noor Laila M Habibah, "Larangan jual beli anjing dan kucing : studi ma'anī al-ḥadīṣ" (Skripsi- UIN Walisongo Semarang, 2017), 76.

Namun, jumhur ulama menilai bahwa larangan tersebut berlaku untuk kucing liar karena tidak memberi manfaat apapun. Sedangkan, untuk kucing peliharaan mereka sepakat membolehkan.

Karena *khilafiyah* dari para ulama ini, maka timbullah didalam masyarakat istilah adopsi kucing dengan mahar yang mana dalam praktiknya menggunakan konsep jual beli. Hal ini merupakan *hillah* karena penggunaan kata adopsi kucing praktiknya jual beli kucing yang mana ada hadits yang melarangnya. Namun, *hillah* ini termasuk jalan keluar untuk menghilangkan keraguan yang dialami masyarakat.

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

Artinya:

Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Praktik adopsi kucing menggunakan mahar termasuk dalam *hillah bil al-istihsan*. Secara *istihsan*, hadits yang melarang jual beli anjing dan kucing yang diriwayatkan oleh Muslim no. 1569 hanya berlaku pada kucing liar yang ada dijalanan. Kata السِّنُّور menurut jumhur ulama

adalah kucing liar yang mana apabila diperjual belikan termasuk perbuatan yang sia-sia (mubazir) karena sifatnya sulit dijinakkan dan takut akan menyakiti majikannya. Maka ada pengecualian kepada kucing peliharaan contohnya kucing ras yang mudah dijinakkan dan tidak bersifat liar. Secara psikologi, memelihara kucing juga dapat membuat

majikannya tidak merasa kesepian dan mempunyai teman bermain pada saat sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa senang pada seseorang.

b. Praktik Adopsi Kucing menggunakan Mahar pada *Petshop* di Kota Palangka Raya dari sisi *Qiyas*

Peneliti juga mengqiyaskan hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* ini dengan hukum jual beli benda najis. Rukun qiyas ada empat macam, yaitu:¹³⁶

- 1) *Ashl*, yaitu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan. Yang menjadi *ashl* dalam praktik adopsi kucing menggunakan mahar ini adalah jual beli benda najis. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh jual beli barang yang tidak ada manfaatnya, seperti serangga dan binatang buas yang tidak bisa digunakan untuk berburu, singa dan serigala misalnya. Karena sesuatu yang tidak punya manfaat tidak ada nilainya, maka menerima uang atau imbalan dari barang seperti itu termasuk memakan harta orang dengan batil. Begitupun sebaliknya, memberi imbalan atas barang seperti itu termasuk perilaku yang bodoh.¹³⁷
- 2) *Far'u*, yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. Yang menjadi *far'u* adalah praktik adopsi kucing menggunakan mahar.
- 3) Hukum *ashl*, hukum jual beli benda najis adalah haram. Menurut mazhab syafi'i, objek yang dijual harus memenuhi syarat suci dan

¹³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 87-88.

¹³⁷ Ibid, 118.

memiliki manfaat. Benda najis dijelaskan dalam firman Allah surah al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya...

Namun, ulama Syafiiyah atau pengikut madzhab Syafi'i memberikan tawaran solusi bahwa barang-barang ini dapat dimiliki dengan cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli.

- 4) 'illat, yaitu sifat yang terdapat pada *ashl*. kesamaan 'illat antara jual beli benda najis dengan adopsi kucing adalah pada objek yang diperjualbelikan. Jual beli benda najis sah selama tidak untuk dikonsumsi tapi diambil manfaat lain. Seperti kotoran yang dijadikan pupuk tanaman. Pada mazhab syafi'i, uang yang diberikan kepada penyedia kotoran tersebut sebagai upah hasil jerih payahnya mengumpulkan kotoran untuk pupuk tanaman.

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa objek yang diperjualbelikan adalah suci dan bermanfaat. Kucing digolongkan pada hewan najis untuk dimakan karena kucing memiliki taring dan memakan mangsanya dengan cakarinya. Oleh karena itu, adopsi kucing dengan tujuan untuk dikonsumsi hukumnya tidak sah. Namun, berbeda dengan tujuan adopsi kucing adalah untuk memelihara kucing hukumnya boleh. Karena badan

dan air liur kucing sifatnya suci serta kucing bermanfaat untuk mengusir tikus yang ada di rumah sekaligus menjadi teman disaat majikannya kesepian.

Sama halnya dengan jual beli kotoran, dalam praktik adopsi kucing ada namanya mahar yang dimaksudkan sebagai upah pelaku usaha *petshop* merawat dan menjaga kucing tersebut sebelum diadopsi pengadopsi.

c. Praktik Adopsi Kucing menggunakan Mahar pada *Petshop* di Kota Palangka Raya dari sisi *Maslahah*

Untuk menentukan kemaslahatan dari praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangka Raya, perlu mengkajinya dengan melihat syarat-syarat dalam menentukan kemaslahatan. Adapun syarat-syarat *mashlahah*, antara lain:¹³⁸

1) *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga, *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.¹³⁹ Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.¹⁴⁰ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

¹³⁸ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 137-138.

¹³⁹ Ibid., h. 137.

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 359.

Kemaslahatan dalam praktik adopsi kucing menggunakan *petshop* dapat dilihat dari 2 sisi, antara pelaku usaha *petshop* dan pengadopsi kucing. Dari sisi pelaku usaha *petshop* dalam praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* mendapatkan laba untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan dari sisi pengadopsi kucing mendapatkan kesenangan untuk menyalurkan hobinya merawat kucing.

2) *Maṣlahah* itu harus bersifat umum dan menyeluruh

Dalam praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop*, baik itu pelaku usaha *petshop* maupun pengadopsi kucing mendapatkan kemaslahatan. Selama pengadopsi tidak merasa keberatan dan senang untuk merawat kucing ras yang mana kebutuhannya dapat dibilang mahal. Maka, tidak ada permasalahan. Namun, apabila pengadopsi kucing merasa keberatan dalam merawat kucing ras, sehingga membuat kucingnya stress bahkan mati karena kebutuhannya tidak dipenuhi, maka tidak sepenuhnya praktik adopsi kucing menggunakan mahar mengandung kemaslahatan secara menyeluruh.

3) *Maṣlahah* harus sesuai dengan *syara'*

Adopsi kucing menggunakan mahar tidak bertentangan dengan *syara'*. Karena secara objeknya, suci dan memiliki manfaat. Pada praktiknya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha *petshop* dan pengadopsi. Dan masih dalam koridor *an*

taradin minkum. Serta tujuannya adalah untuk memelihara kucing dirumah bukan untuk di konsumsi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bila ditinjau dari *maşlahah* maka praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* ini memenuhi beberapa syarat *maşlahah* sehingga praktik adopsi ini dari sisi masalah adalah sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adopsi kucing menggunakan mahar yang terjadi pada *Petshop-Petshop* di Kota Palangka Raya merupakan praktik tukar menukar kucing ras seperti ras anggora, himalaya, persia, dan lain-lain dengan mahar tertentu yang awalnya ditentukan oleh pelaku usaha *petshop* yang biasanya berupa uang. latar belakang adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* di Kota Palangka Raya adalah praktik adopsi kucing yang berjalan pada *petshop-petshop* di Kota Palangka Raya. Yang mana para pelaku usaha *petshop* menggunakan kata adopsi kucing untuk memperhalus jual beli kucing dan mahar yang dimaksud dalam praktik tersebut adalah upah merawat dan menjaga selama kucing itu di *petshop*.
2. Status hukum adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* adalah boleh selama kucing yang diadopsi tidak untuk dikonsumsi. Ditinjau secara *hillah al-hukmi*, Praktik adopsi kucing menggunakan mahar termasuk dalam *hillah bil al-istihsan*. Secara *istihsan*, hadits yang melarang jual beli anjing dan kucing yang diriwayatkan oleh Muslim no. 1569 hanya berlaku pada kucing liar yang ada dijalanan. Kata *السِّنُّور* menurut jumhur ulama adalah kucing liar yang mana apabila diperjual belikan termasuk perbuatan yang

sia-sia (mubazir) karena sifatnya sulit dijinakkan dan takut akan menyakiti majikannya. Maka ada pengecualian kepada kucing peliharaan contohnya kucing ras yang mudah dijinakkan dan tidak bersifat liar. Secara psikologi, memelihara kucing juga dapat membuat majikannya tidak merasa kesepian dan mempunyai teman bermain pada saat sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa senang pada seseorang. Ditinjau secara *qiyas*, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* diqiyaskan dengan jual beli benda najis. Menurut mazhab syafi'i, objek yang diperjual belikan adalah suci dan bermanfaat. Kucing di kategorikan hewan najis untuk dikonsumsi oleh karena itu adopsi kucing dengan tujuan untuk di makan adalah dilarang. Namun, kucing termasuk hewan yang suci badan dan air liurnya sehingga jumhur ulama sepakat bahwa memperjualbelikan kucing boleh. Dan ditinjau secara *maṣlaḥah*, praktik adopsi kucing menggunakan mahar pada *petshop* ini memenuhi beberapa syarat *maṣlaḥah* sehingga praktik adopsi ini dari sisi masalah adalah sah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait hukum adopsi kucing menggunakan maha pada *petshop* di Kota Palangka Raya tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada MUI Kota Palangka Raya agar mengeluarkan fatwa tentang fenomena adopsi kucing menggunakan mahar yang marak terjadi untuk meluruskan pandangan masyarakat Kota Palangka Raya sehingga tidak terjadi keraguan.

2. Kepada calon pengadopsi kucing agar selalu berhati-hati dalam menggunakan hartanya dan belanjakanlah untuk benda-benda yang bermanfaat terlebih dahulu.
3. Kepada pelaku usaha *petshop* agar memberikan bukti adopsi kucing kepada pengadopsi agar pengadopsi memiliki akta adopsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia.

Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2004, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.

Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika.

al-Khudduri, Madjid, 1999, *Teologi Keadilan Perspekti Islam*. terj, Surabaya: Risalah Gusti.

al-Satibi, Abu Ishaq, 1999, *al-Muwafaqat fi Usul al- Shari'ah* Juz IV, Beirut: Dar al-Ma'riah.

Andiko, Toha, 2011, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.

Arifin, Miftahul dan Faisal Hag, 1997, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani.

Bakry, Nazar, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Basyir, Ahmad Azhar, 1972, *Kawin Campur, Adopsi, Waiat Menurut Islam*, Bandung: PT Al- Ma'rif.

- Dahlan, Abd. Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet ke-2.
- Dahlan, Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Faturrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djunaedi, MS. Wawan, 2008, *Fiqh*, Jakarta: PT. Listafariska Putra.
- Djuwani, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, Jhon. M. dan Hassan Sadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet ke-23.
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Fasa, Muhammad Iqbal, 2016, *Reformasi Pemahaman Teori Maqashid syaria: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, *Hubungan Suami Istri dan Perceraian*, Purwokerto : Qaulan Karima.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Fauziyah, Umi, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoardjo*, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Ghazali, Abd. Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Habibah, Noor Laila M, 2017, *Larangan jual beli anjing dan kucing : studi ma'anī al-ḥadīṣ*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
- Harun, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: ALFABETA.
- Kasdi, Abdurrahman, 2014, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*.
- Kementerian Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT AdhiAkarsa Abadi Indonesia.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Setia.
- Kholifah, Umi, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucng Peliharaan (studi di Petshop Purwokerto, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto*.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset.
- Moleong, Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu'alim, Amir dan Yusdan, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Muhktar, Kamal, 1994, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang.

Mujib, Abdul, 2001, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia.

Musbikin, Imam, 2001, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ningrum, Ririn Tri Puspita, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*, Ejournal.Kopertais.

Rosyadi, Imron, 2013, *Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan*, SUHUF, Vol. 25.

Scahtch, Joseph, 1971, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopedia of Islam*, ed. Vol. III, Leiden: E.J. Brill.

Shidiq, Sapiudin, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Simonangkir, J.C. T., dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-8.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: ALFABETA.

Sumitro, Irma Setiyowati, 1994, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syafe'i, Rachmat, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.

Syalthut, Mahmud, *al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Qalam.

- Syarifuddin, Amir, 2009, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari, 2009, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Permata Press, 2010, *Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, PERMARA PRESS.
- Umam, Chaerul, 2000, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Usman, Muchlis, 1999, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Muchlis, 2001, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utsman, Sabian, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yanggo, Chuzaemah T., 2002, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Yusuf, Muhammad, 2013, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XVIII.
- Zahrah Muhammad Abu, 2007, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Zahrah, Abu, *Tarikh al-Mazahb al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1994, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Zaini, Muderis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zazuli, A., 2019, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta Timur: Prenada Media.

B. Internet

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya,

<https://palangkakota.bps.go.id/statictable/2019/03/05/195/jumlah-penduduk-kota-palangka-raja-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2013-2017.html> diakses pada hari Kamis, 23 Januari 2020 pukul 13.59 WIB.

<http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 08.02 WIB.

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/KALIMANTAN%20TENGAH/KOTA%20PALANGKARAYA> di akses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 07.04 WIB.

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 07.14 WIB..

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raja/> diakses pada hari Sabtu, 18 Januari 2020 pukul 08.10 WIB.

<https://www.tagar.id/profil-kota-palangkaraya-calon-ibu-kota-indonesia> diakses pada hari Selasa, 04 Februari 2020 pukul 07.26 WIB.

Meonggers, <http://www.meonggers.com/memelihara/adopsi-kucing> diakses pada hari Jumat, 17 Januari 2019 Pukul 11.19 WIB.

Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Jual Beli Kucing*, 2013, <http://rumaysho.com/3549-hukum-jual-beli-kucing.html>. diakses pada tanggal 15 September 2018, pukul 11.45 WIB.

Rizky Chandra Septania, *Indonesia Pengguna Facebook Terbanyak ke-4 di Dunia*, <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/02/08181617/indonesia-pengguna-facebook-terbanyak-ke-4-di-dunia>. diakses pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 20.25 WIB.

C. Wawancara

Wawancara bersama ASL pada hari Minggu, 23 Februari 2020 pukul 19.46 sampai dengan 20.12 WIB

Wawancara bersama DL pada hari Sabtu, 25 Januari 2020 pukul 15.00 sampai dengan 15.15 WIB.

Wawancara bersama MAI pada hari Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 11.06 sampai dengan 11.30 WIB.

Wawancara bersama NI pada hari Minggu, 26 Januari 2020 pukul 14.29 sampai dengan 14.45 WIB.

Wawancara bersama R pada hari Senin, 18 Februari 2020 pukul 16.30 sampai dengan 17.00 WIB.

Wawancara bersama US pada hari Sabtu, 1 Februari 2020 pukul 09.03 sampai dengan 09.13 WIB.

Wawancara bersama ZA pada hari Selasa, 11 Februari 2020 pukul 13.15 sampai dengan 13.57 WIB.

Wawancara dilaksanakan di *Petshop* KENZIRO pada Jumat, 14 September
2018 pada Pukul 10.00-10.20 WIB.

